HASIL KEPUTUSAN

MUSYAWARAH BESAR Ke II

LEMKARI

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM

KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Tgl. 10 s/d 12 JUNI 1981 DI JAKARTA

HASIL KEPUTUSAN

MUSYAWARAH BESAR Ke – II

LEMKARI

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM

KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Tgl: 10 s/d 12 - JUNI - 1981 DI JAKARTA

SAMBUTAN MENTERI AGAMA R.I.

PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMBAGA KARYAWAN DA'WAH ISLAM (LEMKARI) KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA TANGGAL 10 JUNI 1981 DI JAKARTA

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI AGAMA R.I.

PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMBAGA KARYAWAN DA'WAH ISLAM (LEMKARI) KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA TANGGAL 10 JUNI 1981 DI JAKARTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas taufiq dan inayah-Nya sehingga kita pada saat yang berbahagia ini dapat bersama-sama menghadiri upacara Pembukaan Musyawarah Besar ke II Lembaga Karyawan Da'wah Islam (LEMKARI) Keluarga Besar Golongan Karya di Gedung Granada.

Bertitik tolak dari thema Mubes ke II ini yaitu: "Peningkatan Metodologi Da'wah di dalam rangka menunjang Pembinaan Trilogi Kerukunan Hidup Beragama serta Partisipasi umat Beragama dalam mensukseskan Pembangunan Bangsa", maka saya mengharapkan kepada forum Mubes ke II LEMKARI untuk dapat menjabarkan thema ini dalam bentuk kegiatan nyata yang positif dan konstruktif yang relevan dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia, membina masyarakat adil dan makmur yang merata

materiil dan spirituál berdasarkan Pancasila.

Upaya Pemerintah dalam hubungannya dengan proses pencepatan pembangunan bangsa baik dalam sektor fisik materiil maupun sektor mental-spiritual diarahkan untuk mencari jalan bagaimana agar proses itu berjalan dengan cepat dan murah.
Menyadari hal ini, maka pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama sebagai syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas dan ketutuhan nasional perlu ditingkatkan dan dibina terus. Oleh karena itu upaya para pemimpin dan anggota Lemkari dalam mencari rumusan bagi suatu peningkatan metodologi da'wah guna menunjang pembinaan kerukunan hidup umat beragama adalah suatu amal bakti yang besar sekali nilainya buat Pemerintah, mengingat kenyataannya di masyarakat masalah kerukunan ini belum sepenuhnya dipahami.

Saya ingin menggaris bawahi tentang partisipasi umat beragama dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Era Orde Baru adalah era pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang melingkupi pembangunan fisik-materiil dan pembangunan mental-spiritual. Upaya yang mulia ini yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menyongsong hari depannya yang lebih baik lagi perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat yang beragama ini. Oleh karena itu partisipasi umat beragama dalam rangka mensukseskan pembangunan bangsa ini adalah mutlak diperlukan, mengingat bahwa derap pembangunan bangsa ini akan lebih cepat dan murah, bila lewat bahasa agama. Hal ini karena pembangunan yang sedang kita laksanakan ini mempunyai wajah dua dimensi yaitu fisik-materiil dan mental-spiritual, artinya bukan hanya bertujuan agar melimpah-ruahnya materiil semata, akan tetapi juga bahwa hasil pembangunan itu mampu memberi kebahagiaan batin, kesejukan rohani bangsa Indonesia yang beragama ini.

Untuk itulah pada kesempatan ini saya menghimbau saudara-saudara agar hal-hal berikut ini kiranya dapat dijadikan pedoman sehingga amal-bakti Saudara-saudara selaku anggota LEMKARI

Keluarga Besar Golongan Karya benar-benar merupakan suri tauladan umat, yakni:

1. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna bagi mantapnya tiga kerukunan hidup umar beragama itu diharapkan agar saudara-saudara para peserta Musyawarah Besar ke II mencarikan rumusan-rumusan yang efektif bagi peningkatan metodologi da'wah dengan melihat beberapa aspek psikologis/sosiologis di masyarakat, sehingga pada pelaksanaannya Saudara-saudara tidak akan mengalami hambatan;

2. Partisipasi umat beragama dalam mensukseskan pembangunan bangsa yang diinginkan ialah partisipasi umat beragama secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, sehingga proses pembangunan yang sedang digalakkan ini berjalan secara wajar dan cepat. Artinya umat beragama yang sekaligus selaku partisipan yang aktif, bukan selaku penonton.

Demikian sambutan saya, semoga Allah SWT selalu memberkati usaha kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI AGAMA R.I.

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI

PENJELASAN SINGKAT DIRPUS LEMKARI DALAM UPACARA PEMBUKAAN MUBES II LEMBARI TANGGAL 10 JUNI 1981 DI JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Bapak Menteri Agama yang kami hormati.
Yth. Bapak Menteri Penerangan yang kami hormati.
Yth. Bapak Menteri Sosial yang kami hormati.
Yth. Bapak Jaksa Agung yang kami hormati.
Yth. Bapak Ketua Umum/Ketua DPP Golkar yang kami hormati.
Yth. Bapak Ketua Umum DPP MDI yang kami hormati.
Yth. Bapak/Ibu para tamu undangan yang kami hormati dan segenap peserta Mubes serta warga LEMKARI yang kami sayangi.

Sebagai pencetusan rasa kesyukuran kita yang tertanam dalam sanubari keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur Alhamdulillahi Robbil 'alamin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah serta rokhmat-Nya kepada kita bersama, khususnya didalam kesempatan menyelenggarakan dan menghadiri upacara pembukaan MUBES II LEMKARI ini semuanya adalah semata-mata atas izin serta Ridlo Alloh Swt.

Juga dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat datang atas kehadliran Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada acara MUBES II LEMKARI ini. Dengan iringan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya guna menghadiri acara ini dan semoga MUBES ini dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Yang terhormat Bapak-bapak Menteri serta tamu undangan yang kami mulyakan, perkenankanlah kami dalam memasuki acara-acara didalam upacara PEMBUKAAN MUBES II LEMKARI yang nantinya akan diresmikan pembukaannya oleh Yth Bapak Menteri Agama, terlebih dahulu agar segala yang menyangkut LEMKARI dengan kegiatan MUBES nya ini dapat tergambarkan kejelasannya, maka kami mohon izin kepada segenap hadlirin dan hadirat vang kami mulyakan agar Dirpus LEMKARI diberi kesempatan memaparkan seuntai uraian penjelasan.

Uraian yang kami susun sesingkat mungkin tanpa mengurangi kejelasan yang diharapkan, kami perinci menjadi beberapa bagian yang merupakan mata uraian yang berurutan dan sistimatik.

LEMKARI sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan umat mempunyai tri-daya guna atau tiga pendayagunaan, ialah *pertama* sebagai lembaga dakwah keagamaan, *kedua* sebagai lembaga pendidikan kemasyarakatan, *ketiga* sebagai lembaga pengembang potensi Golongan Karya dan antar tiga fungsi pendaya gunaan tersebut, terjalin kegiatan yang saling melengkapi satu dengan lainnya sehingga terwujudlah citra pembinaan kesejahteraan umat menuju masyarakat adil makmur baldatun thoyibatun warabun goffur.
Sebagai *lembaga dakwah keagamaan* maka motif dakwah LEMKARI diilhami oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut dalam surat Ali Imron ayat 110 dan surat An Nahl ayat 125 yang berbunyi:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . سورة ال عمران - ١١٠

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
سورة النحل : ١٢٥

Dalam usaha meningkatkan pendaya gunaan agama perlu senantiasa ditekankan *peran agama dalam empat faktor* antara lain agama sebagai *faktor motivatif, faktor kreatif, faktor sublimatif,* dan *faktor integratif,* kesemuanya diarahkan untuk menghasilkan keselarasan yaitu:

— keselarasan hubungan manusia dengan Alloh.
— keselarasan hubungan manusia dengan manusia.
— keselarasan hubungan manusia dengan alam lingkungan.
— keselarasan hubungan antar bangsa.
— keselarasan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat.
Dengan arah mewujudkan keselarasan hidup tersebut maka pokok-pokok kegiatan dakwah ke agamaan antara lain meliputi:

1. menegakkan dan memberikan pembinaan rasa percaya dan ketakwaan kepada Allah Swt sebagai keyakinan keagamaan yang proporsionil dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan berlandaskan falsafah Pancasila.

2. Mengarahkan pembinaan serta pemupukan ketakwaan/keimanan kepada Allah Swt dengan bersumberkan pokok ajaran agama Islam Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam kerangka tata kehidupan spiritual dengan mendasarkan serta berpandangan kepada kerukunan hidup ber-agama untuk menuju persatuan nasional yang kokoh dan dinamis.

3. Mengembangkan pemikiran beragama yang luas dengan didasarkan atas sikap saling hormat menghormati antara sesama dan berbagai pemeluk agama serta penganut aliran kepercayaan didalam memberikan arti ma'na dan arti yang jelas bagi kebebasan beragama sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Bab II angka 1.

4. Memberikan ajakan, contoh dan suri/tauladan yang baik didalam tata kehidupan individu dan bermasyarakat untuk penyadaran betapa besar urgensinya penghayatan kegiatan beragama karena agama mempunyai dimensi dalam usaha menselaraskan dan menseimbangkan kebahagiaan rohaniyah dan jasmaniyah dalam mempertinggi keluhuran budi bangsa Indonesia.

5. Mengembangkan metode dan kode etic dakwah dengan ber-

pangkal tolak kepada pengajaran pribadi terhadap peresapan serta penghayatan kehidupan beragama sesuai dengan kodrat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah Swt sehingga tidak ada pemunculan kesan adanya paksaan dalam beragama.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,

Kemudian dalam kesempatan ini kami bermaksud untuk menjelaskan tentang keadaan Lemkari sampai saat ini, yaitu bahwa Lemkari yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan dan bersifat sebagai lembaga pendidikan masyarakat bukan merupakan lembaga pendidikan formal yang memakai sistem klasikal, tetapi merupakan pendidikan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat dalam memenuhi tuntutan akan kebutuhan pembinaan rohaniah khususnya dalam penghayatan hikmah-hikmah ajaran agama Islam sebagai wahyu Illaahi dan juga dalam memenuhi tuntutan hajat pembangunan masyarakat, maka ini berarti bahwa selain Lemkari secara langsung berusaha membina dan melancarkan tuntutan rohaniah individual, juga berusaha membina dan melancarkan tuntutan kebutuhan rohaniah bersama antar individu, baik dalam dimensi agama itu sendiri maupun dalam dimensi duniawi/kemasyarakatan dengan serentak, dengan harapan bahwa Lemkari nantinya akan dapat memperlancar kehidupan manusia yang menuju kearah keselarasan kehidupan dunia dan akhirat.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa cita-cita pembangunan yang telah dituangkan dalam GBHN/P4 adalah pembangunan manusia seutuhnya, yaitu manusia-manusia Indonesia yang dapat mencapai keselarasan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Lemkari dalam tugas-tugas duniawinya tidak dapat terlepas dari suatu kelaziman, bahwa sebagai suatu lembaga/organisasi harus senantiasa secara berkala mengadakan pertemuan dengan para warga/anggotanya umat Islam di Indonesia pada khususnya, dan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia pada umumnya, sesuai dengan perkembangan pembangunan yang sedang kita laksanakan.

Untuk itulah Dir.Pus. Lemkari memandang perlu untuk menyelenggarakan Mubes II ini yang hal ini dimungkinkan pula setelah melihat bahwa dalam anggaran dasar Lemkari telah mencantumkan periode-periode dilaksanakannya Mubes.

Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati,

Tahap pembangunan kita sekarang ini adalah pada tahap Pelita III yang sebentar lagi dengan tidak terasa akan memasuki Pelita IV, dengan sendirinya keadaan ini telah banyak membawa perubahan-perubahan tata kehidupan yang luas baik segi kuantitatif maupun segu kualitatifnya, baik yang bersifat positif maupun yang merupakan hal-hal yang tak terduga sebelumnya, yang harus segera ditangani. Oleh karena itu melalui Mubes II ini, Lemkari akan berusaha agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang selaras dengan perkembangan umat Islam dewasa ini dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan yang dijalankan bangsa Indonesia Kini dan Esok.

Mubes II yang merupakan forum pertemuan warga Lemkari yang berasal dari berbagai pelosok tanah air dapat merupakan wadah kegiatan konsolidasi organisasi untuk antara lain:

1. Menghimpun potensi Lemkari yang ditujukan untuk kelancaran misinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan serta untuk mensukseskan pembangunan dalam barisan Keluarga Besar Golongan Karya.
2. Menyusun program/menentukan langkah yang dalam misinya bertujuan agar senantiasa dapat meningkatkan penghayatan beragama bagi umat Islam dan dapat mendorong suatu kreativitas individual maupun kemasyarakatan yang mengarah kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang mempunyai keselarasan kehidupan dunia dan akhiratnya, sesuai dengan GBHN dan P4.
3. Menyelenggarakan proses regenerasi dimana bagi generasi se-

belumnya dapat memberikan pengalamannya kepada generasi penerus, sebaliknya generasi penerus diharapkan dapat mengenal problema-problema secara kritis agar diperoleh suatu kondisi masyarakat yang tak statis, namun tetap dalam suatu landasan ideologi Pancasila untuk mencapai tujuan kemerdekaan melalui keseluruhan proses pembangunan yang sedang kita jalankan sampai saat ini.
Ketiga kerangka diatas yang akan diolah dalam Mubes ini diharapkan akan dapat menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang akan meningkat daya guna Lemkari dalam ihtiar mencapai target citranya.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Sesuai dengan yang telah kami sampaikan terdahulu, bahwa Lemkari sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan perlu senantiasa menjaga citranya yang dapat dirumuskan dalam kerangka tri-daya guna/fungsi, yaitu:
1. Sebagai pendidikan dakwah keagamaan
2. Sebagai pendidikan kemasyarakatan
3. Sebagai pengembang potensi Golkar.

Sebagai lembaga pendidikan kemasyarakatan Lemkari senantiasa berusaha untuk memberikan pendidikan nilai dan akhlak kemanusiaan yang luhur, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas masyarakat, tanpa memandang golongan dan lapisan masyarat, memberikan ilmu-ilmu yang dapat langsung diamalkan melalui metode yang praktis sehingga masing-masing warga Lemkari dalam masyarakat tetap utuh dan terpelihara kepribadiannya selaku insan Pancasila.

Sebagai pengembang potensi Golkar maka Lemkari akan senantiasa berusaha untuk memperluas dan memasyarakatkan gagasan-gagasan pembangunan agar dapat dimengerti secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, serta membina potensi budidaya masyarakat bersatu dalam barisan orde baru dalam keluarga besar Golongan Karya.

Akhirulkalam kami dari Dir.Pus. Lemkari mengajak seluruh anggota Lemkari serta keluarga besar Golongan Karya untuk bersama menatap kedepan, menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dan bekerja sama mewujudkan cita-cita perjuangan Orde-Baru. Dan kita siapkan diri kita untuk mensukseskan Pemilu 1982 sebagai usaha nyata guna memelihara kontinuitas dan kelangsungan pembangunan yang telah dirintis sampai dengan awal Pelita IV.
Semoga Alloh memberikan kekuatan dan ridlo-Nya atas segala niat baik dan usaha kita semua, dan kepada para peserta kami mengucapkan selamat ber-Mubes dan selamat meneruskan perjuangan Orde Baru. Dengan Lemkari kita Jayakan Golkar.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAKHATULLAHIBARAKATUH.

Jakarta, 10 Juni 1981

Ketua I
Dirpus. LEMKARI

R.H. Eddy Masiadi

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I
==========

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomor: I/MUBES-II/LEMKARI/1981
T e n t a n g
PIMPINAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Besar ke-II LEMKARI yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 10 s/d 12 Juni 1981.

2. Bahwa untuk menjaga kelancaran serta ketertiban jalannya permusyawaratan dan rapat-rapat dalam Mubes-II LEMKARI dimaksud perlu ditetapkan/disahkan Pimpinan Mubes yang berwibawa.

3. Bahwa oleh karena itu perlu adanya Keputusan tentang Pimpinan Mubes-II LEMKARI.

Mengingat:

1. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor: Kep-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan Nomor: Kep-103/C-4/VI/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Mubes-II LEMKARI.

2. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor: Kep-72/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 tentang Panitia Pengarah (Steering Commitee) Mubes-II LEMKARI.

Memperhatikan:

Permusyawaratan dalam Mubes-II LEMKARI yang membahas Rancangan Keputusan tentang Pimpinan Mubes-II LEMKARI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE-II LEMKARI TENTANG PIMPINAN MUSYAWARAH BESAR KE-II LEMKARI (LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM).

PERTAMA : Pimpinan Mubes-II LEMKARI dipilih dari dan oleh peserta Mubes didalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta.

K E D U A : Pimpinan Mubes-II LEMKARI merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pimpinan Mubes-II LEMKARI.

a. Memimpin rapat-rapat selama Mubes-II LEMkari.
b. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam permusyawaratan dan rapat-rapat Mubes-II LEMKARI.

KEEMPAT : Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Mubes-II LEMKARI diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KELIMA : Komposisi dan Personalia Pimpinan Mubes-II LEMKARI terdiri dari:

1. K e t u a : Ir. Abdullah Syam
2. Wakil Ketua I : R.S. Kurnaen Rasyidi, SH.
3. Wakil Ketua II : Drs. H.A. Suarno
4. Sekretaris I : M. Noer Ali
5. Sekretaris II : H. Abdul Malik, BA
6. Anggota : Andi Askin Lantara
7. Anggota : D. Sunaryo, BA

KEENAM : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan semestinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 10 Juni 1981.—

DIREKTURIUM PUSAT LEMKARI
S E L A K U
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA KE-I
MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

K e t u a,

MUSYAWARAH BESAR KE-II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

R.H. EDDY MASJADI — M. NOER ALI

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I
==========

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomor: II/MUBES-II/LEMKARI/1981
T e n t a n g

PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH BESAR KE-II LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
(L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang:

1. Bahwa Musyawarah Besar ke-II LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, akan terselenggaranya pada bulan Juni 1981.

2. Bahwa untuk terselenggaranya Musyawarah dengan baik agar dapat mencapai hasil guna sebanyak-banyaknya, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara dan tatalaksananya.

3. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya Kepu-

tusan tentang Peraturan Tata Tertib Mubes-II LEMKARI sebagai kesepakatan bersama di dalam bermusyawarah.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar LEMKARI Bab IX Pasal 20 dan Pasal 21.
2. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor: Kep-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan Nomor: Kep-103/C/4/VI/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Mubes-II LEMKARI.
3. Keputusan Mubes-II LEMKARI Nomor: I/MUBES-II/LEMKARI/1981 tentang Pimpinan Mubes-II LEMKARI.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Mubes-II LEMKARI yang membahas Rancangan Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib Mubes-II LEMKARI.
2. Keputusan Rapat Paripurna ke-I Mubes-II LEMKARI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE-II LEMKARI TENTANG PERATURAN TATA-TERTIB MUBES-II LEMKARI.

P E R T M A : Peraturan Tata Tertib Musyawarah Besar ke-II Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) secara lengkap dan terperinci adalah seperti tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

K E D U A : Peraturan Tata Tertib Mubes-II LEMKARI seperti dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan pedoman dan pegangan untuk pelaksanaan permusyawaratan dan rapat-rapat selama Mubes-II LEMKARI.

KETIGA : Peraturan Tata Tertib seperti dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini hanya berlaku untuk Mubes-II LEMKARI.

KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

K E L I M A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 1981

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA
P I M P I N A N

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Ketua, Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE-II
L E M K A R I
==========

L A M P I R A N :

KEPUTUSAN MUBES-II L E M K A R I
NOMOR : II/MUBES-II/LEMKARI/1981
TANGGAL: 10 — J U N I — 1981.

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR KE-II LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I) KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Musyawarah Besar LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islam) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang selanjutnya dalam Peraturan Tata Tertib ini disebut Mubes-II LEMKARI.

2. Musyawarah Besar ke-II LEMKARI dalam melakukan tugasnya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Tap. MPR No. IV/MPR/1978, Keputusan Munas-II Golkar tahun 1978 dan Anggaran Dasar LEMKARI.

3. Peserta Mubes-II LEMKARI terdiri dari para peserta seperti dimaksud pada Bab III pasal 3 Peraturan Tata Tertib ini.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Musyawarah Besar ke-II LEMKARI mempunyai tugas dan wewenang untuk :

a. Menetapkan/merubah/menyempurnakan Anggaran Dasar LEMKARI.
b. Menetapkan/merubah/menyempurnakan Program Umum LEMKARI.
c. Memilih dan mengangkat Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI.
d. Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Mubes-II LEMKARI.

BAB III
P E S E R T A

Pasal 3

1. Peserta Mubes-II LEMKARI terdiri dari:
   a. Dewan Kurator LEMKARI.
   b. Direktorium Pusat LEMKARI.
   c. Utusan Perwakilan LEMKARI Tingkat I.
   d. Utusan Senat LEMKARI Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.
   e. Ulama' dan tokoh LEMKARI yang dipandang perlu.
2. Jumlah dan perincian Peserta diatur lebih lanjut oleh Dirpus LEMKARI.

3. Setiap peserta wajib membawa surat mandat.

4. Ketentuan mandat diatur oleh Dirpus LEMKARI.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

Peserta Mubes-II LEMKARI berhak untuk :

a. Mengajukan pertanyaan.
b. Mengajukan usul perubahan.
c. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan ataupun tulisan.
d. Menyatakan suara sebagaimana diatur dalam Bab X pasal 26 Peraturan Tata Tertib ini.
e. Memilih dan dipilih.

Pasal 5

1. Semua pertanyaan disusun secara singkat dan jelas, disampaikan kepada Pimpinan Mubes.
2. Pimpinan Mubes berhak mengambil kesimpulan dari hasil pertanyaan itu.

Pasal 6

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Komisi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila hal ini tidak mungkin diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 7

Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Tata Tertib ini.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUBES

Pasal 8

Alat-alat kelengkapan Mubes-II LEMKARI disusun sesuai dengan

pengelompokan kegiatan pelaksanaan tugas Mubes.

Pasal 9

Musyawarah Besar ke-II LEMKARI mempunyai Alat-alat kelengkapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Mubes-II LEMKARI.
b. Komisi-komisi Mubes-II LEMKARI.

BAB VI
PIMPINAN MUBES

Pasal 10

1. Mubes-II LEMKARI dipimpin oleh Pimpinan Mubes yang dipilih dari dan oleh Peserta dalam Rapat Paripurna.
2. Rapat Paripurna yang dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Direktorium Pusat LEMKARI.
3. Pimpinan Mubes-II LEMKARI bersifat kolektif, yang personaliannya dipilih dari unsur-unsur :
   a. Dewan Kurator LEMKARI
   b. Direktorium Pusat LEMKARI.
   c. Perwakilan LEMKARI Tingkat-I.
   d. Senat LEMKARI Tingkat-II Kabupaten/Kotamadya.
4. Komposisi Pimpinan Mubes-II LEMKARI terdiri dari seorang Ketua, 2 (Dua) orang Wakil Ketua, 2 (Dua) orang Sekretaris dan 2 (Dua) orang anggota.
5. Wewenang Pimpinan Mubes-II LEMKARI ialah:
   a. Memimpin rapat-rapat selama Mubes.
   b. Menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah dan rapat-rapat selama Mubes.
6. Pembagian tugas diantara unsur-unsur Pimpinan Mubes-II LEMKARI diatur lebih lanjut oleh Ketua.

BAB VII
KOMISI-KOMISI

Pasal 11

Mubes-II LEMKARI membentuk Komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

1. Komisi Mubes-II LEMKARI bertugas memusyawarahkan dan mengambil Keputusan tentang masalah-masalah yang menjadi acara Rapat Komisi dalam bidang lingkup tugasnya.
2. Hasil permusyawaratan Komisi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Mubes.
3. Komisi Mubes-II LEMKARI memberikan laporan kepada Rapat Paripurna tentang hasil karya masing-masing.
4. Komisi-komisi dibantu oleh Sekretariat Panitia Mubes.
5. Pembicaraan dalam Rapat Komisi disusun dalam suatu risalah.

Pasal 13

1. Setiap Peserta diwajibkan menjadi anggota salah satu Komisi Mubes-II LEMKARI, kecuali Dewan Kurator.
2. Susunan dan jumlah anggota Komisi ditentukan oleh Pimpinan Mubes dalam Rapat Paripurna.
3. Pimpinan Mubes dapat menghadiri dan turut serta dalam semua Rapat Komisi untuk melakukan tugas koordinasi.

Pasal 14

1. Pimpinan Komisi Mubes-II LEMKARI terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
2. Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Mubes.
3. Pimpinan Komisi Mubes-II LEMKARI merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15

Musyawarah Besar ke-II LEMKARI terdiri dari serangkaian jenis-jenis rapat:

a. Rapat Paripurna Mubes.
b. Rapat Pimpinan Mubes.
c. Rapat Komisi Mubes.

Pasal 16

Rancangan Jadwal Acara Mubes disampaikan oleh Pimpinan Mubes kepada Rapat Paripurna untuk disahkan.

Pasal 17

1. Peserta berbicara setelah mendapat ijin dari Ketua Rapat.
2. Ketua Rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya.
3. Apabila Ketua Rapat hendak berbicara menggunakan haknya sebagai peserta, maka ia menyerahkan Pimpinan Rapat kepada yang lain dan untuk sementara ia meninggalkan tempat duduknya.
4. Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara.
5. Sebelum berbicara, para pembicara terlebih dahulu mendaftarkan namanya.

Pasal 18

1. Pimpinan Rapat hendak menentukan lamanya peserta berbicara.
2. Bilangan pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, Pimpinan Rapat memperingatkan agar ia mengakhiri pembicaraannya.

Pasal 19

Setiap waktu kepada peserta dapat diberikan kesempatan interupsi untuk:

a. Minta penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan.
b. Mengajukan usul prosedure tentang soal yang dibicarakan.
c. Mengajukan usul menunda Rapat untuk sementara.

Pasal 20

1. Penyimpangan dari pokok pembicaraan tidak diperkenankan.
2. Apabila seorang pembicara mempergunakan kata-kata atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan rapat, maka Pimpinan Rapat dapat memberi nasehat/peringatan agar ia berbuat tertib kembali.
3. Pembicara yang tidak mengindahkan peringatan Pimpinan Rapat, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil keputusan boleh atau tidaknya pembicara yang bersangkutan terus mengikuti rapat.
4. Apabila dipandang perlu Pimpinan Rapat berhak menunda rapat untuk sementara.

Pasal 21

Untuk setiap rapat sedapat-dapatnya dibuat risalah lengkap laporan tulisan-cepat dan/atau rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan dalam rapat, juga mencantumkan:

a. Tempat dan acara rapat.
b. Hari/Tanggal dan jam permulaan dan penutupan rapat.
c. Ketua dan Sekretaris Rapat.
d. Nama-nama peserta yang hadir.
e. Nama-nama pembicara dan pendapatnya.
f. Keterangan tentang keputusan/kesimpulan.

BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN
DEWAN KURATOR DAN DIREKTORIUM
PUSAT LEMKARI

Pasal 22

1. Pemilihan Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI dilakukan dengan pemilihan Formatur dengan mandat penuh.
2. Formatur terdiri dari tiga (3) orang, masing-masing dari unsur Dewan Kurator, Direktorium Pusat LEMKARI dan Perwakilan LEMKARI Daerah Tingkat I.
3. Pemilihan Formatur dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga (2/3) dari jumlah peserta.

Pasal 23

Dengan terpilihnya Formatur, maka Direktorium Pusat LEMKARI yang lama dengan sendirinya menjadi demisionair.

Pasal 24.

Formatur mengumumkan susunan Dewan Kurator dan Direktorium Pusat LEMKARI yang baru pada Rapat Paripurna terakhir dari Musyawarah Besar ke-II LEMKARI.

BAB X
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

Pasal 25

1. Rapat Paripurna dinyatakan syah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separo dari jumlah peserta.

2. Rapat Paripurna untuk membentuk Komisi-komisi dan memilih Formatur sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta.

Pasal 26

1. Tiap peserta mempunyai hak satu (1) suara.
2. Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Keputusan berdasarkan mufakat adalah syah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya separo dari jumlah peserta.
4. Pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah syah, apabila:
   a. Diambil dalam Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta (quorum).
   b. Disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang hadir, yang memenuhi quorum.

Pasal 27

1. Dalam hal pungutan suara menunjukkan suara sama banyak, maka pungutan suara diulang sekali lagi.
2. Apabila hasil ulangan pungutan suara tetap sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Mubes.

Pasal 28

Pungutan suara tentang orang atau masalah-masalah penting dilakukan dengan rahasia atau tertulis.

Pasal 29

Pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung, kecuali pengambilan keputusan secara rahasia.

Pasal 30

Untuk menetapkan/merubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Program Umum, maka:

a. Sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta harus hadir.
b. Putusan diambil dari sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah yang hadir.

BAB XI
SEKRETARIAT

Pasal 31

1. Sekretariat Musyawarah Besar ke II LEMKARI dipimpin seorang Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Mubes-II LEMKARI atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
2. Sekretariat Mubes-II LEMKARI dibantu oleh Staf Sekretariat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Mubes-II LEMKARI.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 1981

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA
P I M P I N A N



Ketua,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

Sekretaris,

(M. NOER ALI)

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomor: III/MUBES-II/LEMKARI/1981
Tentang
JADWAL ACARA MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Mubes ke-II LEMKARI untuk terselenggaranya musyawarah dan rapat-rapat dengan tertib, maka perlu ditetapkan adanya Jadwal Acara.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya satu Keputusan tentang Jadwal Acara Mubes ke-II LEMKARI.

Mengingat:

1. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor: Kep-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan Nomor: Kep-103/C-4/VI/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Mubes II LEMKARI.
2. Keputusan Mubes ke-II LEMKARI Nomor: I/MUBES-II/LEMKARI/1981 tentang Mubes ke-II LEMKARI.

3. Keputusan Mubes ke-II LEMKARI Nomor: II/MUBES/ LEMKARI/1981 tentang Peraturan Tata Tertib Mubes-II LEMKARI.

Memperhatikan:

Permusyawaratan dalam Mubes ke-II LEMKARI yang membahas rancangan Keputusan tentang Jadwal Acara Mubes ke-II LEMKARI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE-II LEMKARI TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH BESAR KE-II LEMKARI (LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM).

PERTAMA : Jadwal Acara Musyawarah Besar ke-II LEMKARI secara lengkap dan terperinci adalah seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

K E D U A : Jadwal Acara seperti dimaksud pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman didalam penyelenggaraan Musyawarah Besar ke-II LEMKARI.

KETIGA : Perubahan atas Jadwal Acara Musyawarah Besar ke-II LEMKARI untuk penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan, dapat dilakukan dengan persetujuan Mubes ke-II LEMKARI.

KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

K E L I M A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 1981

MUSYAWARAH BESAR KE-II L E M K A R I
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA
P I M P I N A N

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
Karyawan Dakwah
Besar Golongan
12 Juni

K e t u a, Sekretaris,

Ir. ABDULLAH SYAM M. NOER ALI

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE - II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
NOMOR : III/MUBES-II/LEMKARI/81
TANGGAL : 10 JUNI — 1981.

Hari/Tanggal	J A M	SIDANG/RAPAT	KEGIATAN	PIMPINAN
R a b u 10 Juni 1981	09.00 — 12.00	Upacara Pembukaan	A c a r a : 1. Pembukaan 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3. Mengheningkan cipta 4. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an 5. Sari Tilawah 6. Prakata Ketua Panitia Pelaksana 7. Penjelasan Dirpus. LEMKARI 8. Sambutan-sambutan a. Ketua DPP GOLKAR 9. Amanat pengarahan Bapak Menteri Agama RI. 10. Peresmian pembukaan MUBES II LEMKARI. 11. Pembacaan Do'a 12. P e n u t u p	Protokol
R a b u	14.00 — 14.30 14.30 — 15.00	Sidang Pleno I	Pemilihan Pimpinan Mubes Pengesahan Tata Tertib Mubes	Dirpus LEMKARI Pimpinan MUBES

	15.00 — 16.30		Laporan daerah	Pimpinan Mubes
	19.30 — 21.00	Sidang Pleno II	Pertanggung jawaban Dirpus	Pimpinan Mubes
	21.00 — 23.00		Pembentukan Komisi-Komisi	Pimpinan Mubes
K a m i s 11 Juni 1981	08.00 — 10.00	Sidang Pleno III	Pengarahan Bp. H.M. Sugianto	Pimpinan Mubes
	10.00 — 12.00	sda	Pengarahan Bp. Ali Murtopo	Pimpinan Mubes
	14.00 — 16.00	Sidang Pleno IV	Pengarahan Bp. Soepardjo	Pimpinan Mubes
	19.30 — 23.00	Sidang Pleno V	Pengarahan Bp. H. Amir Murtono, SH.	Pimpinan Mubes
J u m ' a t 12 Juni 1981	08.00 — 09.30	Sidang Komisi	Sidang-sidang Komisi	Pim.Komisi Mubes
	09.30 — 11.30	sda	sda	sda
	14.00 — 15.30	Sidang Pleno VI	Pengarahan Bp. KHA. Tohir Widjaya	Pimpinan Mubes
	15.30 — 16.30	Sidang Pleno VII	Pengesahan hasil Sidang Komisi	Pimpinan Mubes
	sda		Pembentukan Formatur	Pimpinan Mubes
	19.30 — 20.00	Sidang Pleno VIII	Laporan/pengesahan Hasil Kerja Formateur	Pimpinan Mubes
	20.00 — 20.30	sda	Pelantikan Pengurus Dirpus Baru	Pimpinan Mubes
	20.30 — 21.00	sda	Serah Terima	Pimpinan Mubes
	21.00 — 21.30	sda	Pidato Penutupan oleh DPR GOLKAR	Panitia Pelaksanaan.

Ditetapkan di : Jakarta;
Pada tanggal : 10 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA
PIMPINAN

Ketua,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

(M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)

KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomor: IV/MUBES-II/LEMKARI/1981

T e n t a n g

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH BESAR KE II LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I

KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM
MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang:

1. Bahwa Musyawarah Besar ke II LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan Organisasi, perlu mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kelangsungan hidup Organisasi, baik mengenai Struktur pengorganisasian, Anggaran Dasar dan Program Umum, maupun mengenai saranaOrganisasi lainnya, agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan/kemajuan pembangunan yang berlaku, terutama dalam usaha memberikan peningkatan kehidupan beragama dan partisipasi pembangunan masyarakat.

2. Bahwa untuk kelancaran serta ketertiban dalam permusyawaratan guna mengambil keputusan atas masalah-masalah tersebut, perlu dibentuk komisi-komisi MUBES II LEMKARI sesuai dengan lingkup permasalahannya.

3. Bahwa oleh karena itu perlu adanya satu Keputusan tentang Pembentukan Komisi-komisi Mubes-II LEMKARI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar LEMKARI Bab IX pasal 20.

2. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor: Kep-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan Nomor: Kep-103/C-4/VI/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Mubes-II LEMKARI.

3. Keputusan Mubes-II LEMKARI Nomor: II/MUBES-II/LEMKARI/1981 tentang Peraturan Tata Tertib Mubes-II LEMKARI.

Memperhatikan:

Permusyawaratan dalam Mubes-II LEMKARI yang membahas Rancangan Keputusan tentang Pembentukan Komisi-komisi Musyawarah Besar ke-II LEMKARI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUBES II LEMKARI.

P E R T A M A : Membentuk Komisi-komisi Musyawarah Besar ke II LEMKARI, masing-masing sebagai berikut:

Komisi I : Yang membahas tentang Anggaran Dasar berikut penjelasannya dan juga masalah Organisasi lainnya.

Komisi II : Yang membahas Program Umum dan Program Kerja.

Komisi III : Yang membahas tentang prinsip-prinsip dakwah.

K E D U A : Tugas Komisi-Komisi dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah memusyawarahkan dan mengambil keputusan atas masalah yang menjadi acara Rapat Komisi sesuai dengan lingkup permasalahannya masing-masing.

KETIGA : Jumlah anggota masing-masing Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna Mubes II LEMKARI yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta.

KEEMPAT : Pimpinan Komisi-komisi dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bersifat kolektif dan masing-masing terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil dan seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang bersangkutan.

KELIMA : Hasil keputusan permusyawaratan Komisi-komisi dilaporkan pada Rapat Paripurna Mubes II LEMKARI tanggal 12 Juni 1981.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a;
Pada tanggal : 10 Juni 1981.—

PIMPINAN

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Ketua,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

Sekretaris,

(M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)

KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomoe: V/MUBES-II/LEMKARI/1981

T e n t a n g

PERTANGGUNGAN JAWAB DIREKTORIUM PUSAT
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
PERIODE 1975 — 1981

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi, Direktorium Pusat Lemkari dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar serta berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Besar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

2. Bahwa karena itu Direktorium Pusat Lemkari yang bersifat kolektif sebagai mandataris Musyawarah Besar, tunduk dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar Lemkari.

3. Bahwa Direktorium Pusat Lemkari periode 1975 - 1981 telah memberikan laporan pertanggung jawaban dalam Rapat Paripurna ke III Mubes II Lemkari tanggal 10 Juni, 1981 di Jakarta.

4. Bahwa Musyawarah Besar II Lemkari memandang perlu menanggapi, menilai dan mengambil keputusan terhadap laporan pertanggung jawaban Direktorium Pusat Lemkari tersebut.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Lemkari Bab VII fasal 18.

2. Keputusan Muker III Lemkari tahun 1979 di Kediri.

3. Keputusan Dirpus Lemkari No. : Kep-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan No. Kep-103/C-4/VI/1981 tanggal 3 Juni 1981.

4. Keputusan Mubes II Lemkari No. : II/Mubes-II/LEMKA-RI/1981 tentang Peraturan Tata Tertib Mubes II Lemkari.

Memperhatikan:

Permusyawaratan dalam Musyawarah Besar II LEMKARI yang membahas pertanggung jawaban Direktorium Pusat LEMKARI periode 1975 — 1981.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Musyawarah II LEMKARI tentang: Pertanggung jawaban Dir-Pus LEMKARI periode 1975 — 1981.

PERTAMA : Menerima dan mengesahkan Pertanggung jawaban Dir-Pus LEMKARI periode 1975 - 1981 yang disampaikan oleh Ketua I Dirpus LEMKA-RI mewakili Ketua Umum Dirpus Lemkari (Surat Kuasa Nomor: 106/A-3/VI/1981 tanggal 5 Juni, 1981), yang disampaikan dalam rapat Paripurna III Mubes II LEMKARI tanggal 10 Juni, 1981 di Jakarta.

KEDUA : Materi pertanggung jawaban Dirpus LEMKARI seperti dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Materi pertanggung jawaban Dirpus LEMKARI seperti dimaksud pada diktum kedua keputusan ini selanjutnya dijadikan pertimbangan dan referensi bagi Dirpus LEMKARI periode berikutnya dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya.

Keempat : Apabila ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni, 1981

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

PIMPINAN
MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
Lembaga Karyawan Dakwah Islam
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

K e t u a, Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA
Nomor: VI/MUBES-II/LEMKARI/1981

T e n t a n g

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang:

1. Bahwa Musyawarah Besar ke II LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, mempunyai tugas dan wewenang untuk merubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar LEMKARI.

2. Bahwa Musyawarah Besar ke II LEMKARI memandang perlu untuk mengambil Keputusan terhadap perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar LEMKARI
agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan dan pembangunan yang sedang berlangsung.

3. Bahwa dalam langkah-langkah pendewasaan serta pemantapan organisasi LEMKARI perlu adanya penyesuaian diri agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam usaha menunjang program-program perjuangan Golongan Karya/ program-program Pemerintah Orde Baru.

4. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan penyusunan

Anggaran Dasar yang mantap, sistimatis, praktis dan dinamis.

5. Bahwa oleh karena itu perlu adanya satu keputusan tentang perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar.

Mengingat:

1. Ketetapan MPR : IV/MPR/1978

2. Keputusan Munas II Golkar tahun 1978 di Denpasar Bali.

3. Anggaran Dasar Lemkari Bab XI Pasal 23.

4. Keputusan Muker III Lemkari tahun 1979 di Kediri.

5. Keputusan Dirpus Lemkari No: Kep.-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan No. :Kep dan No.:Kep.-103/C-4/ VI/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Mubes II.

6. Keputusan Mubes II LEMKARI No.: II/MUBES-II/LEMkari/1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang peraturan Tata Tertib Mubes II LEMKARI.

Memperhatikan:

1. Pidato pengarahan B pk Menteri Agama R.I. pada upacara pembukaan Mubes II LEMKARI tanggal 10 Juni 1981 di Gedung Granada Jakarta.

2. Pengarahan Bapak H. Ali Murtopo selaku anggota Dewan Pembina Pusat Golongan Karya Pada Mubes ke II Lemkari tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.

3. Pengarahan Bapak H. Soepardjo selaku sekretaris Dewan Pembina Pusat Golongan Karya pada Mubes ke II Lemkari tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.

4. Pengarahan Bapak H. Amir Murtono SH Ketua Umum DPP Golkar pada Mubes-II Lemkari tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.

5. Pengarahan Bapak H. Muchlis Sugianto Sekjen DPP Golkar pada Mubes II LEMKARI tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.

6. Pengarahan Bapak K.H. Tohir Widjaya Ketua Umum DPP Majlis Dakwah Islamiyah (MDI) pada Mubes II Lemkari tanggal 12 Juni 1981 di Jakarta.

7. Permusyawaratan dalam rapat komisi Mubes-II Lemkari yang membahas rancangan Anggaran Dasar Lemkari.

8. Keputusan rapat Paripurna ke-VIII Mubes -II Lemkari tanggal 12 Juni 1981 di Jakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI TENTANG PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR LEMKARI.

PERTAMA : Merubah/menyempurnakan Anggaran Dasar Lemkari yang disyahkan dalam Musyawarah Besar ke-I Lemkari tahun 1975 di Kediri.

KEDUA : Perubahan/penyempurnaan Acara seperti dimaksud pada diktum pertama keputusan ini tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan ditentukan tersendiri oleh Direktorium Pusat LEMKARI dengan persetujuan dewan Kurator.

KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 1981

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

PIMPINAN

K e t u a,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 1 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN MUSHAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
NOMOR : VI/MUBES II/LEMKARI/1981
TANGGAL: 12 JUNI 1981.

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
(LEMKARI

MOTTO:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . سورة آل عمران - ١١٠

Artinya:
"Adalah kamu sekalian sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk segenap manusia (jika) kamu sekalian menyuruh ke dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kamu sekalian kepada Allah" (Surat Ali Imran ayat 110).

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

سورة النحل : ١٢٥

Artinya:
"Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik" (Surat An-Nahl ayat 125).

MUQADDIMAH

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, menyadari dengan sepenuhnya:

1. Bahwasanya didalam kelanjutan perjuangan Orde Baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara kita, mutlak dibutuhkan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat Indonesia. Maka tanpa mengurangi peranan golongan lain, ummat Islam Indonesia berkewajiban sepenuhnya untuk menyumbangkan amal jariyah dan amal shalihnya didalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, spirituil maupun materiil, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Prominensie (penekanan) dari amal jariyah serta amal shalih ummat Islam Indonesia adalah berupa karya yang non politik dan karya yang semata-mata ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum untuk meningkatkan akhlak dan taraf hidup rakyat.

3. Untuk lebih menertibkan dan menghidupkan amal jariyah dan amal shalih tersebut, dalam rangka menunjang dan melang-

sungkan program pemerintah dalam masa Pelita yang berorientasi pada Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam GBHN, dirasakan perlu adanya suatu lembaga karyawan dakwah Islam yang non politik dan hanya merupakan wadah yang profesional, maka dengan ini disusunlah Anggaran Dasar Lembaga Karyawan Dakwah Islam sebagai berikut:

BAB I
NAMA; WAKTU, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama: LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM, dapat disingkat "LEMKARI".

Pasal 2.

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas sejak tanggal 3 Januari 1972.

Pasal 3

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini bernaung di dalam lingkungan Keluarga Besar Golongan Karya.

Pasal 4

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini berpusat di Jakarta dan dapat membentuk Perwakilan di seluruh Indonesia.

BAB II
AZAS; TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM berazaskan Pancasila.

Pasal 6

Tujuan LEMBAGA DAKWAH ISLAM ini ialah memberikan peningkatan kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam turut serta membangun manusia Indonesia seutuhnya di dalam tata susunan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur jasmaniah maupun rohaniah.

Pasal 7

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini berfungsi sebagai wadah dan sarana bagi para Da'i/Muballigh dan Muballighah di dalam mengkaji dan melaksanakan karya dakwahnya untuk menyampaikan dan menyebar luaskan Agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam.

BAB III
SIFAT DAN SISTIM

Pasal 8

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini bersifat sebagai lembaga pendidikan dahwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang berdasarkan atas keselarasan dan keseimbangan dunia dan akhirat.

Pasal 9

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini merupakan lem-

baga pendidikan non formal dengan menyajikan ilmu keagamaan dan pengetahuan pembangunan yang dititik beratkan kepada amaliah (applied science), untuk memenuhi hajat massa dalam proses pembangunan masyarakat seutuhnya.

BAB IV
USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 10

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini bertugas pokok untuk melaksanakan dakwah Agama Islam dengan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan segenap aspek pengembangan kesejahteraannya, agar penghayatan beragama dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila yang diridloi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok yang disebut di atas, LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini mengadakan usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang:

1. PENDIDIKAN KEAGAMAAN:

a. Mengadakan peningkatan pendidikan agama di pondok-pondok pesantren, masjid-masjid dan surau-surau dalam rangka mempertinggi akhlak agama serta mewujudkan toleransi beragama.

b. Menyelenggarakan pengajian-pengajian agama di masjid-masjid, surau-surau dan instansi-instansi swasta/Pemerintah, lembaga-lembaga serta dalam lingkungan keluarga yang menghendakinya.

c. Menyelenggagakan ceramah-ceramah keagamaan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

d. Mengadakan perpustakaan untuk mempertinggi mutu pengetahuan.

2. PENDIDIKAN/PENGETAHUAN PEMBANGUNAN:

a. Mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi karyawan-karyawan dakwah.

b. Menyelenggarakan pelajaran-pelajaran pengetahuan umum di pondok-pondok pesantren.

c. Menyelenggarakan pelajaran-pelajaran kejuruan yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat.

d. Menyelenggarakan latihan-latihan kerja dalam bidang pembangunan masyarakat.

3. PARTISIPASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT:

a. Mengadakan kegiatan amal sosial di masyarakat.

b. Turut meningkatkan pendayagunaan potensi desa/masyarakat dalam proses pembangunan.

4. PENDIDIKAN JASMANI DAN PEMBINAAN GENERASI MUDA :

a. Mengadakan peningkatan usaha dalam bidang pembinaan kesegaran rokhani dan jasmani, khususnya bagi generasi muda dan putus sekolah (dupout).

b. Mengadakan pembinaan/pengarahan generasi muda.

c. Mengatasi problem di kalangan generasi muda.

BAB V
KEWARGAAN

Pasal 12

1. Warga LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM sifatnya sukarela dan tidak mengikat serta terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Yang disebut warga LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM adalah orang-orang yang bersedia mengikuti kegiatan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM dan menyetujui Anggaran Dasar, Program serta seluruh keputusan hasil-hasil musyawarah.

Pasal 13

Warga LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM berhak untuk mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Aparatur LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM terdiri dari:

1. Dewan Kurator dan Direktorium di Tingkat Pusat.

2. Perwakilan di Daerah Tingkat I (Propinsi).
3. Senat di Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya)
4. Komisariat di Tingkat Kecamatan dan
5. Study-group (kelompok belajar) sebagai unit terkecil.

Pasal 15

Struktur ini dapat ditambah atau dikurangi menurut keadaan setempat.

Pasal 16

Dewan Kurator dan Derektorium ditunjuk dan dipilih oleh Musyawarah Besar, Perwakilan Daerah Tingkat I dipilih oleh Musyawarah Daerah Tingkat I dan disyahkan oleh Direktorium, Senat dipilih dalam Musyawarah Daerah Tingkat II dan disyahkan oleh Perwakilan, Komisasiat dan Study-group ditunjuk oleh Senat.

Pasal 17

Periode kepengurusan berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 18

1. Dewan Kurator memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Direktorium dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan Anggaran Dasar LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM.
2. Direktorium Pusat terdiri dari beberapa Ketua, Sekjen, Bendahara dan Ketua-ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengaturan

kegiatan Organisasi ke luar maupun ke dalam berdasarkan Anggaran Dasar dan segala keputusan yang diambil oleh Musyawarah Besar.

3. Perwakilan Daerah Tingkat I bertugas melaksanakan Program dan Anggaran Dasar, baik yang dibebankan oleh Direktorium Pusat maupun hasil-hasil keputusan Musyawarah Perwakilan Daerah Tingkat I.

4. Senat bertugas melaksanakan Program dan Anggaran Dasar, baik yang dibebankan oleh Perwakilan maupun hasil-hasil dari keputusan Musyawarah Senat Daerah Tingkat II.

5. Komisariat dan Study-group melaksanakan program dan Anggaran Dasar yang dibebankan oleh Senat.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 19

Musyawarah dan Rapat LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM terdiri dari:

1. Musyawarah Besar, diselenggarakan sedikitnya lima (5) tahun sekali, dihadiri oleh segenap Dewan Kurator, Direktorium beserta segenap Stafnya, Pengurus Perwakilan Daerah Tingkat I dan Senat Daerah Tingkat II.
2. Musyawarah Daerah Tingkat I, diselenggarakan sedikitnya tiga (3) tahun sekali, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Perwakilan Utusan Direktorium Pusat dan Utusan Senat di daerahnya.
3. Rapat Senat diselenggarakan sedikitnya dua (2) tahun sekali, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Senat, Utusan Komisariat dan Pimpinan Study-group.

Pasal 20

Rapat Kerja Direktorium, Perwakilan Daerah Tingkat I dan Senat diselenggarakan sedikitnya satu (1) tahun sekali.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

Musyawarah/Rapat adalah syah apabila dihadiri oleh lebih dari satu perdua (½) yang wajib hadir dan keputusan diambil atas dasar mufakat.

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 22

Kekayaan Yayasan terdiri dan diperoleh dari:

a. Modal pertama pada waktu mendirikan Yayasan ini.
b. Sokongan-sokongan/sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, organisasi sosial maupun Pemerintah.
c. Derma-derma yang sifatnya tetap/tidak tetap dan tidak mengikat.
d. Dana-dana yang tidak mengikat yang sifatnya tetap maupun tidak tetap.
e. Hasil-hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dalam pasal sebelas (11).
f. Usaha-usaha lain yang syah dan diridloi Allah Subhanahu wa-Ta'ala.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/PEMBUBARAN

Pasal 23

Setiap perubahan yang diadakan dalam Anggaran Dasar LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini hanya dianggap syah bilamana mendapat persetujuan dua pertiga (2/3) suara dari Musyawarah Besar.

Pasal 24

LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini dapat dibubarkan bilamana ternyata bahwa LEMKARI tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan usahanya.

Pasal 25

Keputusan untuk membubarkan LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini dianggap syah bilamana mendapat persetujuan dari paling sedikitnya dua pertiga (2/3) suara dalam Musyawarah Besar yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.

Pasal 26

Jika LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM ini dibubarkan maka dengan mengindahkan hukum Islam, Dewan Kurator beserta Team Likwidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan/ membereskan semua hutang piutang LEMKARI dan mengawasi serta menyalurkan sisa kekayaan LEMKARI sesuai dengan yang disebut dalam "Azaz", "Tujuan" dan "Usaha" dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam

peraturan-peraturan Direktorium pada persetujuan Dewan Kurator sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Juni 1981

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

PIMPINAN
MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Ketua, Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
(L E M K A R I)

KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA
Nomor : VII/MUBES—II/LEMKARI/81

T e n t a n g

PERUBAHAN / PENYEMPURNAAN PROGRAM UMUM LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIIM

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
(L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

MENIMBANG :

1. Bahwa Musyawarah Besar ke II LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, mempunyai tugas dan wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan Program Umum LEMKARI.
2. Bahwa Musyawarah Besar ke II LEMKARI memandang perlu untuk mengambil keputusan terhadap perubahan/penyempurnaan Program Umum LEMKARI agar dapat disesuaikan dan selaras dengan perkembangan keadaan dalam pembangunan.
3. Bahwa dalam langkah-langkah penyelarasan organisasi yang semakin lebih dimantapkan, perlu adanya penyesuaian diri sehingga memungkinkan adanya partisipasi yang lebih aktif dalam usaha menunjang program-program Golongan Karya dan program-program Pemerintah Orde Baru.
4. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan penyusunan Program Umum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan LEMKARI, serta untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam kerja sama dengan berbagai golongan di masyarakat, guna mengisi cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional.
5. Bahwa oleh karena itu perlu adanya satu keputusan tentang perubahan/penyempurnaan Program Umum.

MENGINGAT :

1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978.
2. Keputusan MUNAS II GOLKAR Tahun 1978 di Denpasar, Bali.
3. Keputusan MUKER III LEMKARI Tahun 1979 di Kediri.
4. Keputusan Dirpus LEMKARI Nomor : Kep-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan Nomor : Kep-103/C-4/VI/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Mubes II LEMKARI.
5. Keputusan Mubes II LEMKARI Nomor : II/MUBES-II/LEMKARI/81 tanggal 12 Juni 1981 tentang Peraturan Tata Tertib Mubes II LEMKARI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato pengarahan Bapak Menteri Agama RI H. Alamsyah Ratu Prawiranegara pada upacara pembukaan Mubes II LEMKARI tanggal 10 Juni 1981 di Jakarta.
2. Pidato pengarahan Bapak Ali Moertopo selaku Dewan Pembina Pusat Golongan Karya dalam Mubes II tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.
3. Pidato pengarahan Bapak H. Sapardjo selaku Sekretaris Dewan Pembina Pusat Golongan Karya.
4. Pidato pengarahan Bapak H. Amir Murtono, SH, Ketua Umum DPP Golongan Karya.
5. Pidato pengarahan Bapak H. Mukhlis Sugiyanto, Sekjen DPP Golongan Karya.

6. Permusyawaratan dalam Rapat Komisi II Mubes ke II LEMKARI yang membahas Rancangan Program Umum LEMKARI.
7. Putusan Rapat Paripurna ke VIII MUBES II LEMKARI Tanggal 12 Juni 1981 tentang Program Umum LEMKARI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI TENTANG PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN PROGRAM UMUM LEMKARI.

Pertama : Mengubah/menyempurnakan Program Umum LEMKARI yang disyahkan dalam Musyawarah Besar ke I LEMKARI Tahun 1975 di Kediri.

K e d u a : Perubahan/penyempurnaan Program Umum LEMKARI seperti dimaksud pada diktum pertama keputusan ini tercantum pada *Lampiran* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

K e t i g a : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dengan persetujuan Dewan Kurator LEMKARI.

Keempat : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Juni 1981

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
(L E M K A R I)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

P I M P I N A N

K e t u a ,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 12 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN MUBES II L E M K A R I
NOMOR : VII/MUBES II/LEMKARI/'81
TANGGAL : 12 JUNI 1981.

PROGRAM UMUM
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

D A F T A R I S I

Halaman

BAB I : MUQADDIMAH 1
A. Pengertian 2
B. Maksud 2
C. Landasan 3
D. Ruang Lingkup 3
E. Pelaksanaan 3

BAB II : TUJUAN DAN STRATEGI DASAR 4
A. Tujuan 4
B. Strategi Dasar 4

BAB III : GARIS/ARAH PELAKSANAAN 5
A. Sasaran Umum 5
B. Sasaran Khusus 5
1. Bidang Pendidikan Umum/Ketrampilan 5

2. Bidang Pendidikan Agama 7
3. Bidang Kesejahteraan Sosial/Masyarakat 8

BAB IV : PELAKSANAAN PROGRAM UMUM ORGANISASI SELAMA 5 TAHUN 10

BAB V : PENUTUP 10

****

PROGRAM UMUM
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BAB I
MUQADDIMAH

Bahwasanya tujuan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) adalah memberikan peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pembangunan masyarakat, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

Bahwasanya Lembaga Karyawan Dakwah Islam mempunyai sistem pendidikan kemasyarakatan ("sosiological — education") dan partisipasi kemasyarakatannya ("sosiological — development") dengan pengertian pendidikan dan partisipasi kemasyarakatan diberikan untuk memenuhi hajat massa dalam pembangunan masyarakat, yang sifatnya unifikasi dari pondok-pondok maupun satuan kekaryaan.

Bahwa berhasilnya tujuan dan tugas pokok Lembaga Karyawan Dakwah Islam pada akhirnya akan tergantung pada rasa ikut serta dan rasa tanggung jawab segenap umat Islam.

Memenuhi Panggilan :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . سورة آل عمران - ١١٠

Artinya :

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah" *(Surat Ali Imron ayat 110).*

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

سورة النحل : ١٢٥

Artinya :

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik" *(Surat An-Nahl ayat 125).—*

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ . سورة الرعد : ١١

Artinya :

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" *(Surat Ar-Ra'd ayat 11).—*

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورة الانفال : ٥٣

Artinya :

"Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" *(Surat Al-Anfaal ayat 53).—*

A. Pengertian

1. Program Umum Lembaga Karyawan Dakwah Islam adalah Program Kerja Lembaga Karyawan Dakwah Islam sebagai lembaga pendidikan dan kekaryaan (profesi) dalam bidang-bidang pendidikan keagamaan, pendidikan umum, kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial/masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN STRATEGI DASAR

A. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai di dalam Program Umum ialah mewujudkan nilai-nilai pembaharuan dan pembangunan masyarakat untuk merealisir cita-cita Orde Baru/Orde Pembangunan dengan menitik beratkan pada usaha-usaha sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya gerak Keluarga Besar Golongan Karya untuk turut serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat yang dinamis dalam mengemban kontinuitas pembangunan sebagaimana digariskan dalam GBHN dan MUNAS II Golongan Karya.

2. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dengan bersumber Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk diarahkan kepada terwujudnya sikap hidup yang luhur dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

3. Merintis peningkatan kehidupan beragama yang ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara sesama umat beragama serta meningkatkan amal jariyah dalam bersama-sama membangun masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera serta bertaqwa kepada Allah SWT.

B. Strategi Dasar.

Untuk mewujudkan tujuan Lembaga Karyawan Dakwah Islam di dalam bidang dakwah, kekaryaan (profesi) dan pendidikan meliputi bidang mental dan spiritual ditetapkan Strategi Dasar sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memelihara kehidupan beragama selaras dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa).

2. Meningkatkan dan memelihara hubungan baik antara sesama umat manusia atas dasar saling hormat menghormati keyakinan masing-masing, saling harga menghargai sehingga dapat tercipta suasana kerukunan yang lebih baik.

3. Menjaga kesucian agama dengan cara mempelajari, menghayati dan mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, hingga penyalahgunaan pengertian dan sarana keagamaan dapat dicegah.

4. Meningkatkan dan memelihara i'tikad pengabdian rohaniah dan jasmaniah warga Keluarga Besar Golongan Karya yang beragama Islam sebagai hamba Allah dan Warga Negara Republik Indonesia.

2. Penyusunan dan penuangan Program Umum ini berbentuk :
   a. Tujuan dan Strategi Dasar Lembaga Karyawan Dakwah Islam.
   b. Program Lima Tahun Lembaga Karyawan Dakwah Islam (1981 sampai 1985).

3. Setiap lima tahun program ini ditinjau kembali oleh Musyawarah Besar untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

B. Maksud

Program Umum Lembaga Karyawan Dakwah Islam dimaksudkan untuk dapat memberikan arah bagi gerak dan kerja Lembaga Karyawan Dakwah Islam sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan dalam berpartisipasi melaksanakan pembaharuan dan pembangunan meliputi segala bidang kehidupan masyarakat dalam menunjang program nasional bangsa Indonesia.

C. Landasan

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Strukturil : Undang-UNdang Dasar 1945.
3. Landasan Religi : Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
4. Landasan Konsepsional :
   (1) Semua Ketetapan MPR
   (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golongan Karya.
   (3) Doktrin Golongan Karya
   (4) Anggaran Dasar Lembaga Karyawan Dakwah Islam.
5. Landasan Operasional :
   (1) Keputusan MUNAS II Golongan Karya.
   (2) Program Umum Golongan Karya.
   (3) Keputusan MUBES II Lembaga Karyawan Dakwah Islam.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Program Umum ini meliputi :

1. Kegiatan yang menyangkut kehidupan Lembaga Karyawan Dakwah Islam.
2. Kegiatan yang menyangkut peranan Lembaga Karyawan Dakwah Islam sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan kekaryaan (profesi) pada warga Golongan Karya maupun masyarakat Islam pada umumnya.

E. Pelaksanaan

1. Program Umum ini dilaksanakan oleh Pengurus Pusat (Direktorium) Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang dituangkan dalam bentuk Program Pelaksanaan dan Petunjuk-petunjuk Pelaksanaannya.
2. Program Pelaksanaan Tahunan dan Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan lainnya bersifat mengikat dan wajib melaksanakan oleh aparat Lembaga Karyawan Dakwah Islam di semua tingkat.

BAB III

GARIS/ARAH PELAKSANAAN

A. Sasaran Umum.

1. Meningkatkan kesadaran hidup bernegara untuk mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Progkalasi 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
2. Dalam rangka menggalang persatuan nasional dan kerukunan hidup beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia yang selanjutnya merupakan landasan bagi terciptanya pembangunan dalam segala aspek kehidupan, mengusahakan agar penghayatan keyakinan beragama, khususnya agama Islam dapat membentuk pribadi-pribadi yang berbudi pekerti luhur sehingga dapat mendorong suatu kreativitas kemasyarakatan yang mengarah kepada kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan mutu ajaran serta penghayatan agama Islam dengan bersumberkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga umat Islam Indonesia dapat mengambeg-paramaartakan hikmah-hikmah ajaran agamanya bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam menunjang usaha-usaha pembaharuan dan pembangunan.

B. Sasaran Khusus.

1. *Bidang Pendidikan Umum/Ketrampilan.*

   Dalam kerangka akselerasi dan modernisasi pembangunan masyarakat, pendidikan pada garis besarnya menduduki peranan yang sangat penting. Pemikiran akselerasi modernisasi masyarakat yang dipolakan untuk jangka waktu panjang dapat diperkirakan akan melibatkan satu generasi kehidupan nasional, sehingga responsi dari pemikiran ini jelas memerlukan persiapan dan pembaharuan hidup masyarakat, yang pada dasarnya didukung oleh suatu proses generatif kultural yang merupakan tugas dari pendidik-

an, kapan dan di manapun juga. Pola pendidikan yang bersifat integral menuntut penjalinan yang proporsional antara pendidikan yang disatu pihak sebagai prasarana perkembangan masyarakat dan di pihak lain pendidikan sebagai tugas panggilan yang hakiki ("mision-sacre").

Perkembangan masyarakat Indonesia pada taraf sekarang ini dengan suasana pemikiran yang realistis, menuntut terciptanya iklim baru bagi pendidikan, dengan pembangunan sebagai motifnya. Pembangunan nasional sebagaimana yang digariskan dalam asas perikehidupan dan keseimbangan dalam GBHN menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang berarti adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Dengan bertolak pada pemikiran pendidikan seumur hidup ("long life education") yang motivasinya adalah partisipasi dalam usaha-usaha pembangunan dan pembaharuan masyarakat, mengharuskan adanya usaha pendidikan di dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat, karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Selain itu diperlukan pendidikan masyarakat dalam bidang kerohanian dan keduniawian bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang umur dan tingkatan.

(1) Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam sektor pendidikan umum/ketrampilan.

a. Mengadakan kesiagaan mental, terutama bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan dan dalam menghadapi setiap perubahan keadaan dengan tantangan-tangannya sebagai akibat dari pada dinamika pembangunan dalam masyarakat.

b. Menyiapkan tenaga-tenaga yang terdidik dan terlatih untuk mendukung dan ikut serta dalam usaha usaha pembangunan di segala bidang kehidupan.

c. Menyiapkan kader-kader pembangunan sebagai perintis dalam sektor-sektor pembangunan dan peningkatan kecerdasan masyarakat.

d. Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila pada seluruh lapisan masyarakat.

(2) Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas maka kegiatan-kegiatan diarahkan kepada :

a. Mensukseskan keseimbangan antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.

b. Memberi kesempatan kepada setiap warga/siswa Lembaga Karyawan Dakwah Islam untuk meningkatkan diri dengan melalui pendidikan dan latihan kerja, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam bidang-bidang pembangunan.

c. Memberikan kegiatan-kegiatan yang produktif, terutama kepada generasi muda, sehingga dapat mengembangkan daya kreasi dan inisiatifnya, juga meningkatkan daya cipta dalam berbagai bidang pembangunan dan pembaharuan antara lain melalui Gerakan Pramuka.

d. Memberikan kegiatan pendidikan bagi para warga/siswa Lembaga Karyawan Dakwah Islam tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa).

2. *Bidang Pendidikan Agama.*

Nilai agama yang universal dan abadi sifatnya merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pengembangan dan pembinaan kehidupan serta kebudayaan bangsa. Mengingat peranan dan esensinya tersebut, maka agama merupakan salah satu sumber kegairahan hidup bangsa untuk membangun dan meningkatkan tingkat dan martabatnya. Dengan demikian maka kegairahan hidup beragama merupakan suatu syarat mutlak untuk dapat menghayatkan agama dalam kehidupan bangsa, terutama melalui generasi mudanya, yang selanjutnya akan terjadi pengganti dan penerus

kelanjutan hidup bangsa.
Untuk penghayatan agama dalam kehidupan bangsa hanya dapat disistimatisir melalui kegiatan-kegiatan pendidikan agama secara luas.
Usaha penghayatan agama sebagaimana dimaksudkan di atas hanya dapat mencapai sasarannya apabila dipolakan untuk segenap lapisan masyarakat tanpa memandang umur dan tingkatan dan digali dari sumber aslinya sebagai wahyu Ilahi. Khususnya untuk agama Islam sumber wahyu Ilahi adalah Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul/Hadist Nabi.
Penyampaian ajaran agama Islam yang bersumberkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul akan langsung memberikan nilai-nilai hikmah ajaran agama Islam yang pada dasarnya diturunkan sebagai rahmat Ilahi untuk seluruh alam semesta. Sehingga dengan demikian sebagai rahmat akan lebih dapat menggairahkan kehidupan dalam segala bidang dan menjamin kontinuitas pembangunan.

(1) Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam sektor pendidikan agama ini :

a. Memperkembangkan kehidupan yang serasi dan penuh toleransi di antara semua umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing.

b. Mengusahakan dan menyelenggarakan pelajaran agama Islam dengan bersumberkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang dapat memberikan hikmah-hikmah sebagai rahmat Ilahi dalam berbagai bidang kehidupan untuk seluruh lapisan masyarakat.

c. Mewujudkan Ukhuwah Islamiah dalam rangka menggalang persatuan nasional dan menunjang usaha-usaha pembangunan melalui hikmah bertakwa kepada Allah SWT berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

(2) Dalam mencapai tujuan tersebut di atas kegiatan-kegiatan diarahkan kepada :

a. Memberikan pelajaran-pelajaran agama Islam dengan bersumberkan kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul (Hadits Nabi) kepada segenap lapisan masyarakat tanpa memandang umur, asal, tingkatan dan kedudukan dengan diarahkan kepada nilai universalnya agar menetapi budi luhur dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

b. Melatih dan meningkatkan peranan para muballighin/muballighot dan da'i-da'i dalam berbagai lapangan kehidupan sehingga mereka berhasil melembagakan firman-firman Allah dan Sunnah Rasul sebagai suatu rahmat untuk seluruh alam semesta.

c. Meningkatkan pendidikan agama di pondok-pondok pesantren dengan bersumber wahyu Illahi untuk dapat lebih banyak memberikan nilai-nilai dan hikmah agama dalam bertakwa kepada Allah SWT dan menjamin kontinuitas pembangunan kemanusiaan.

3. *Bidang Kesejahteraan Sosial/Masyarakat.*

Pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam GBHN, adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan diridloi oleh Allah SWT.
Usaha-usaha pembangunan dalam mencapai tujuan mulia tersebut harus merupakan usaha-usaha yang terintegrasikan dan disinkronkan meliputi semua aspek kehidupan manusia. Tujuan pembangunan jelas diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan anggota-anggota masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri pada kelanjutannya akan merupakan landasan dan pendorong bagi setiap peningkatan usaha-usaha pembangunan masyarakat, sehingga menjamin kontinuitas pembangunan.
Melihat betapa besarnya peranan dan potensi yang dimiliki oleh faktor kesejahteraan masyarakat dalam kontinuitas

usaha-usaha pembangunan, maka segala pemikiran dan usaha ke arah kesejahteraan masyarakat seharusnya mendapatkan pembinaan dan pengarahan. Segala pemikiran dan usaha dalam melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peningkatan akhlak, kecerdasan dan kenaikan taraf hidup anggota-anggota masyarakat.

Lembaga Karyawan Dakwah Islam sebagai lembaga kemasyarakatan yang berkewajiban mengembangkan potensi-potensi anggota masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, menyadari akan adanya panggilan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, menyadari akan adanya panggilan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dengan bertolak dari pengembangan kemampuan anggota-anggota masyarakat itu sendiri.

Pengembangan kemampuan ini diarahkan kepada kepercayaan atas kemampuan usaha sendiri dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui latihan-latihan kerja yang bersifat kooperatif.

(1) Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di dalam sektor kesejahteraan sosial ini adalah :

a. Menyadarkan esensi kehidupan di dunia bahwa manusia itu membawa tugas kehambaan dan kekhalifahan.

Tugas kehambaan ialah bahwa semua manusia itu adalah hamba Allah, maka haruslah ia menghamba, menyembah, ta'at dan patuh kepada Allah.

Tugas kekhalifahan ialah bahwa manusia itu dijadikan Allah sebagai khalifah-Nya, sebagai wakil Nya di atas bumi, maka haruslah ia melaksanakan peraturan-peraturan Allah di bumi serta membangun kehidupan damai dan sejahtera.

b. Membangkitkan semangat kerja gotong-royong dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam peningkatan kreativitas kemasyarakatan untuk menaikkan taraf hidup.

c. Membina kelangsungan hidup kooperatif dalam usaha-usaha peningkatan mutu kerja, ketrampilan kerja serta produktivitas kerja.

(2) Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, maka kegiatan-kegiatan diarahkan kepada :

a. Membina kelompok masyarakat melalui study-group untuk ikut serta dalam berbagai kreativitas kemasyarakatan di daerahnya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

b. Menyelenggarakan "Development Centre" dalam berbagai bidang kegiatan produksi, di antaranya sektor pedesaan dan "home industry" untuk mendidik kader-kader pembangunan yang dikirim oleh study-group untuk kemudian dapat mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kepada kelompok masyarakat melalui study-groupnya.

c. Menyelenggarakan unit-unit kerja menurut pembidangan profesinya masing-masing dalam bentuk kegiatan berkooperasi untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM UMUM ORGANISASI SELAMA 5 TAHUN

1. Pelaksanaan Program Umum Lembaga Karyawan Dakwah Islam ini menjadi beban dan tanggungjawab Direktorium Pusat Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang untuk itu perlu dituangkan secara jelas dan terperinci dalam buku petunjuk Rencana Kerja 5 tahun.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja 5 tahun untuk setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Operasionil Tahunan dalam bentuk Program Kerja Tahunan.

BAB V

PENUTUP

Suksesnya pelaksanaan Program Umum Lembaga Karyawan Dakwah Islam ini pada akhirnya akan sangat tergantung kepada partisipasi segenap pimpinan dan ~~warga~~ anggota Lembaga Karyawan Dakwah Islam ~~dan warga Keluarga Besar Golongan Karya dalam~~ mengabdikan dirinya untuk membangun masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa-Ta'ala. berdasarkan Pancasila

Semoga Allah Subhanahu wa-Ta'ala memberikan ridhoNya beserta taufik dan hidayahNya, Amin.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI

PIMPINAN

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI).

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

NOMOR : VIII/MUBES II/LEMKARI/'81

Tentang

PRINSIP-PRINSIP DAKWAH LEMKARI KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Besar Ke II LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi perlu mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi.
2. Bahwa kegiatan-kegiatan LEMKARI perlu diarahkan serta dibina agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan bangsa, terutama untuk menggalang dan meningkatkan partisipasinya dalam usaha-usaha pembangunan nasional.
3. Bahwa usaha pembangunan perlu didukung oleh kondisi masyarakat yang tertib dan tentram, yang hal ini akan sangat dipengaruhi oleh terciptanya suasana kerukunan di dalam masyarakat, terutama kerukunan antar umat beragama.
4. Bahwa kesucian agama Islam harus dijaga dari hal-hal yang bersifat dapat menjauhkan pribadi-pribadi muslim dan umat Islam pada umumnya dari pengertian-pengertian yang sebenarnya dan yang terkandung dalam sumber asli

agama Islam : Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam.

5. Bahwa untuk dapat melaksanakan dakwah secara tertib, benar dan sesuai dengan dinamika masyarakat yang sedang membangun, maka perlu disusun prinsip-prinsip kegiatan dakwah LEMKARI.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Lemkari.
2. Program Umum Lemkari.
3. Keputusan Dirpus Lemkari No. Kep. 71/C-4/V/1981 Tanggal 7 Mei 1981 dan Nomor Kep. 103/C-4/VI/1981 Tanggal 3 Januari 1981 tentang MUBES II LEMKARI.

Memperhatikan :

1. Pidato Pengarahan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia pada Pembukaan MUBES II LEMKARI Tanggal 10 Juni 1981 di Jakarta.
2. Pidato Pengarahan Bapak Ali Murtopo, Pembina DPP Golkar pada tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.
3. Pidato Pengarahan Bapak Saparjo, Sekjen Dewan Pembina Golkar pada tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.
4. Pidato Pengarahan Bapak Haji Amir Murtono, SH, Ketua Umum DPP Golkar pada tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.
5. Pidato Pengarahan Bapak Haji Mukhlis Sugianto Sekjen DPP Golkar pada tanggal 11 Juni 1981 di Jakarta.
6. Pidato Pengarahan Bapak KH Tohir Widjaya, Ketua Umum DPP MDI Keluarga Besar Golongan Karya pada tanggal 12 Juni 1981 di Jakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Keputusan Mubes II Lemkari tentang : Prinsip-prinsip Dakwah Lembaga Karyawan Dakwah Islam (Lemkari) seperti tersebut dalam surat keputusan ini.

2. Apabila ternyata ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan pembetulan semestinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI

P I M P I N A N

Ketua,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

(M. NOER ALI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
NOMOR : VIII/MUBES II/LEMKARI/'81
TANGGAL: 12 — JUNI — 1981.

"PRINSIP-PRINSIP DAKWAH LEMKARI"

I. LANDASAN PEMIKIRAN.

— Kelestarian hidup suatu bangsa pada hakekatnya hanya akan dapat dilangsungkan apabila para warganya, baik secara pribadi maupun kelompok, senantiasa dapat menghasilkan rumusan-rumusan bersama yang merupakan perwujudan adanya kesamaan cita-cita, nilai-nilai, dan norma sosial. Kehidupan bernegara merupakan manifestasi dari seluruh usaha bangsa untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Tanah Air dengan berdasar atas Persatuan serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

— Sejak dicetuskannya Orde Baru, maka kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia telah semakin dikuatkan untuk tetap berjalan dalam arah dan tujuan yang sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam cita-cita kemerdekaan, dengan menggalang seluruh partisipasi bangsa guna diwujudkan dalam usaha-usaha pembangunan.

— Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia merupakan jiwa seluruh rakyat yang memberi kekuatan hidup untuk menyongsong kehidupan lahir batin yang lebih baik dalam masyarakat adil dan makmur.
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural telah memungkinkan diselenggarakannya kehidupan

negara secara harmonis, dan memberikan kerangka terselenggarakannya kehidupan bergotong-royong dalam kerukunan, kebersamaan dan persatuan sesuai dengan azas Bhinneka Tunggal Ika.
Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasional adalah merupakan pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah untuk menetapkan suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian program Pembangunan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu dan berlangsung terus menerus.
Kesemuanya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

— Seluruh cita-cita dan usaha ini untuk mengisi kemerdekaan dan menuju hari depan Bangsa Indonesia yang lebih sejahtera, haruslah senantiasa didukung oleh segenap lapisan masyarakat dalam segala bentuk partisipasinya sesuai dengan bakat, keahlian dan kemampuan masing-masing.
Kerukunan dan persatuan Nasional merupakan fondamen mutlak yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan Pembangunan, sehingga cita-cita perjuangan Orde Baru yang telah dirintis sampai menjelang akhir Pelita III ini benar-benar akan dapat terwujud.

— Dengan memohon ridlo dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selaras dengan segenap cita-cita, usaha dan i'tikad yang tulus dari seluruh Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan Negara menuju kesejahteraan seluruh rakyat maka LEMKARI mengajukan pokok pemikiran sebagai pedoman bagi para anggotanya untuk dapat menempatkan diri secara harmonis dan turut berpartisipasi penuh dalam era pembangunan dewasa ini bersama-sama seluruh lapisan masyarakat dan komponen pendukung Orde Baru lainnya.

II. PANDANGAN DASAR LEMKARI TENTANG PARTISIPASI UMAT BERAGAMA DALAM PEMBANGUNAN DAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA.

1. Pembangunan sebagai Proses Dinamis dalam perubahan sosial.

— Pembangunan adalah merupakan fenomena manusiawi yang bersifat kodrati, yang tumbuh dari keinginan dan cita-cita setiap insan untuk memperoleh kebahagiaan lahiriah dan batiniah yang sejati.

— Pembangunan berada pada proses sejarah suatu bangsa sebagai perwujudan dari gerak hidup bangsa tersebut dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan perubahan kebudayaannya yang berlangsung terus-menerus. Dan oleh karena di dalam suatu bangsa terdapat berbagai ragam keinginan, kebutuhan dan cita-cita, baik secara individu maupun kelompok sosial yang ada berdasarkan ras, suku, agama, politik dan lain-lain, maka usaha pembangunan suatu bangsa merupakan suatu komitmen sosial yang didasari oleh sikap kebersamaan yang positif untuk meningkatkan taraf hidup dan membina kebudayaan yang lebih luhur.

— Pembangunan sebagai usaha untuk menjawab tantangan kehidupan dan kebutuhan yang dihadapi suatu bangsa, selain dalam setiap usaha dan langkah yang ditempuh akan dapat menjawab dan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, juga harus disadari bahwa hasil pembangunan juga akan menimbulkan tantangan dan permasalahan baru dalam skala dan proporsinya yang lain.

— Dengan demikian dalam proses pembangunan ini dibutuhkan dukungan sikap dari setiap individu untuk tidak hanya menuntut dan ingin menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesadaran dan kesanggupan untuk bersedia memelihara dan menjaga proses pembangunan serta siap untuk menjawab tantangan baru

yang akan muncul sebagai konsekuensi logis setiap usaha perbaikan dan peningkatan kehidupan suatu bangsa.

— Pembangkitan kesadaran akan proses dinamis pembangunan sebagai usaha perubahan kehidupan suatu bangsa inilah merupakan suatu tugas yang sejajar kepentingannya dengan usaha-usaha pembangunan materiil yang lain. Tanpa sikap dan kesadaran tersebut, maka kesinambungan pembangunan menjadi pertaruhan yang dapat membahayakan arah dan terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana yang telah dicanangkan.

2. Agama sebagai pembentuk landasan sikap positif untuk membangun.

— Sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam GBHN, maka salah satu potensi bangsa Indonesia yang dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pembangunan bangsa adalah mencakup delapan modal. Di antaranya adalah "modal budaya" yakni bangsa Indonesia yang telah terbentuk dan berkembang sepanjang sejarah, menghasilkan bentuk dan corak masyarakat bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika; dan yang lain adalah "modal rohaniah dan mental" yakni adanya kepercayaan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianut oleh pemeluk agama Islam sebagai mayoritas di Tanah Air.

— Agama merupakan kebutuhan spiritual setiap individu yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, agama akan lekat menjadi satu dan menjadi bagian dasar dalam perilaku setiap anggota masyarakat.

— Agama secara langsung maupun tak langsung juga

merupakan sumber nilai dan norma yang dianut, sehingga agama juga dapat berperan sebagai faktor mengikat masyarakat, yaitu apabila nilai moral yang dijadikan pegangan oleh masyarakat bersumber dan diilhami oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian bila semangat dan cita-cita untuk meningkatkan kehidupan bangsa yang diwujudkan dalam pembangunan dapat didukung oleh motivasi yang bersumber dari nilai agama, maka agama akan dapat berperan secara positif sebagai pembentuk semangat untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita pembangunan dalam kebersamaan dan solidaritas nasional yang kokoh.

— Ditinjau dari kepentingan individu secara spiritual, agama yang memiliki dimensi kedalaman dan bersifat transendens akan mampu menopang dan memberikan sumber kekuatan batiniah sehingga individu yang bersangkutan akan mempunyai daya tahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dan gejolak perubahan yang mungkin muncul dalam dinamika perkembangan masyarakat. Dengan adanya ketangguhan individual ini maka sebagai masyarakat dan bangsa secara keseluruhan akan juga dapat memiliki daya tahan dan daya juang yang kuat sejalan dengan laju pembangunan yang dilaksanakan.

— Oleh karena itu dalam meningkatkan pendaya-gunaan agama, perlu senantiasa ditekankan peranan agama dalam empat faktor, yaitu : agama sebagai faktor motivatif, faktor kreatif, faktor sublimatif dan faktor integratif. Kesemuanya diarahkan untuk menghasilkan kehidupan keselarasan, yaitu :

— keselarasan hubungan manusia dengan Allah ;
— keselarasan hubungan manusia dengan manusia ;
— keselarasan hubungan manusia dengan alam lingkungan ;
— keselarasan hubungan antar bangsa ;
— keselarasan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat.

3. Kerukunan kehidupan umat beragama sebagai dasar persatuan bangsa.

a. Dengan mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan perkembangannya sejak ratusan tahun yang lalu, akan jelas dapat disadari bahwa keberanekaan bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba namun merupakan suatu proses sejarah dan menjadi warisan yang dibentuk oleh berbagai faktor lingkungan dan kebudayaan. Integrasi sosial yang telah berhasil terbentuk menjadi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah merupakan warisan yang sangat berharga dan harus dijaga kelestariannya, terlebih dengan mengingat hari depan anak cucu bangsa Indonesia yang akan melanjutkan kelangsungan kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Keberanekaan bangsa Indonesia selain dengan adanya berbagai suku, ras, adat, kebiasaan, juga dalam hal adanya berbagai agama yang hidup bersama di bawah naungan Pancasila dan UUD 1945 dalam azas Bhinneka Tunggal Ika.
Keaneka-ragaman tersebut ditinjau dalam proses perkembangan dan dinamika masyarakat, di satu segi dapat menjadi ancaman bagi keutuhan dan persatuan nasional akibat adanya kemungkinan konflik yang muncul dari keaneka-ragaman tersebut; di lain segi hal ini dapat menjadi potensi positif dalam bentuk persaingan yang sehat untuk maju, serta dapat dihimpunnya berbagai sumber dan kekuatan menjadi satu barisan yang kokoh dan saling memperkuat untuk membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan.

c. Agama pada hakekatnya mempunyai banyak segi, selain hal-hal yang bersifat praktis dan menyangkut masalah yang dapat dijangkau secara rasional, agama juga membahas hal-hal yang bersifat irrasional dan semata-mata hanya dapat didekati secara naluriah dan keimanan saja. Dengan demikian agama tak akan pernah dapat diperde-

batkan atau dipaksakan keobyektifannya, dan bukan merupakan masalah akademis. Mengingat hakekat inilah maka setiap usaha untuk memperdebatkan masalah agama bukannya akan mendekatkan dan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan masalah baru yang mengandung resiko perpecahan bangsa dan menghancurkan semua usaha pembinaan bangsa yang telah dirintis sejak sebelum kemerdekaan.

d. Oleh karena itu untuk memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup umat beragama perlu senantiasa diadakan dialog yang bertemakan untuk meningkatkan saling pengertian, menghindarkan pertentangan, dan bersama-sama menjawab masalah kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu dialog adalah dalam rangka menggali faktor-faktor kebersamaan yang ada dalam nilai-nilai agama yang ditempatkan dalam kerangka kebersamaan nasional bangsa Indonesia guna mengisi cita-cita kemerdekaan.

4. Penghayatan kesucian ajaran agama untuk memelihara ketenteraman kehidupan masyarakat.

— Agama sebagai ajaran moral dan sumber nilai kehidupan individu pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan bagi pemeluknya dan masyarakat di sekitarnya.

— Agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad S.A.W. adalah merupakan Wahyu Illahi yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, dengan sifat ajarannya yang universal meliputi segala aspek kehidupan secara terpadu, sistematis dan berstruktur. Sesuai dengan sifatnya tersebut maka ajaran agama Islam berlaku untuk segala bangsa, ras, suku, dan semua tingkat usia. Dengan demikian agama Islam merupakan pedoman dari Allah S.W.T. yang menjadi landasan nilai-nilai kehidupan manusia dan masyarakat, bertujuan untuk membentuk suatu peri kehidupan yang sejahtera dan berbahagia dunia akhirat.

bernya — yaitu

— Akibat kurang dihayatinya kesucian agama Islam dan kurang dipahaminya ajaran agama Islam menurut sumbernya — yaitu Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W. — maka pengenalan agama Islam dapat terjadi hanya diperoleh secara sebagian-sebagian, terpisah-pisah, dan tidak dalam keseluruhan kelengkapan aspek serta pemikiran yang sebenarnya terkandung. Sebagai akibat dari hal ini dapat terjadi munculnya tindakan-tindakan dari sebagian pemeluk agama Islam yang bersifat ekstrim serta menimbulkan kekacauan, kerusakan dan keresahan masyarakat. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan suci diturunkannya agama Islam itu sendiri; serta secara keseluruhan dapat merusak citra umat Islam pada umumnya.

— Usaha-usaha untuk memberikan pengertian yang lengkap dan terpadu tentang kesucian agama Islam perlu ditingkatkan, dengan seluas-luasnya mendalami Kitab Suci Al Qur'an dan mempelajari Sunnah Rasulullah S.A.W, serta dengan menghilangkan pencampuran pengertian agama dengan hal-hal yang bersifat politis di luar pengertian dan keaslian agama Islam itu sendiri.

III. POKOK—POKOK PEDOMAN DAN KEBIJAKSANAAN LEMKARI TENTANG PARTISIPASI LEMKARI DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

1. Partisipasi dalam pembangunan.

— Meningkatkan kerja sama antara pimpinan pemerintah yang mempunyai kewenangan formal dengan pimpinan agama/ulama yang mempunyai karisma informal dengan masyarakat di sekitarnya. Sehingga dapat diharapkan timbul iklim yang memungkinkan para tokoh ulama dapat berperan sebagai :

* pelopor untuk memajukan, mensejahterakan dan mencerdaskan umat beragama ;

* sebagai penterjemah nilai dan ajaran agama ke dalam gagasan konkrit yang sejalan dengan usaha pembangunan ;
* sebagai penterjemah ide-ide pembangunan dan usaha usaha untuk memajukan masyarakat ke dalam bahasa yang dimengerti oleh kalangan umat beragama, sehingga timbul kesadaran bahwa membangun bangsa adalah merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri.

— Meningkatkan kegiatan pendalaman ajaran agama Islam untuk menggali nilai-nilai yang terkandung serta memasyarakatkannya, terutama hal-hal yang menyangkut pembinaan kerja sama, dan keuletan sehingga setiap umat beragama akan mempunyai motivasi dan kesadaran yang kuat guna menggerakkan seluruh aspek pembangunan bangsa.

2. Pembinaan kerukunan umat beragama.

— Mengusahakan tercapainya kondisi sosial yang semua golongan agama dapat hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya, masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang taat dalam keadaan rukun dan damai.

Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengarahkan tercapainya kondisi sebagai berikut :

a. Menghilangkan sikap fanatisme buta ;
b. Menghilangkan sikap tak perduli atas hak dan perasaan orang lain ;
c. Membentuk sikap lapang dada, keterbukaan dan toleransi, tanpa harus menjadi sinkretetis yang dibuat buat sehingga merusak nilai agama itu sendiri.

— Menciptakan kondisi dalam masyarakat yang memungkinkan toleransi antar umat beragama dapat dilangsungkan secara wajar, yaitu dengan mengembangkan prinsip

"bersepakat dalam perbedaan", yang mempunyai arti :

a. Mau menerima dan menghormati orang lain dengan sepenuh totalitasnya ;
b. Mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya ;
c. Menghilangkan kebiasaan dan semangat untuk menang sendiri dan merasa paling benar.

— Mewujudkan adanya toleransi yang dinyatakan dalam sikap dan perbuatan.

a. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda atau mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri ;
b. Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dan menjalankan secara sungguh-sungguh keyakinan agamanya ;
c. Sikap saling mempercayai atas i'tikad baik golongan agama lain. Toleransi dalam perbuatan diwujudkan dalam :

1. Usaha untuk bisa mengerti terhadap ajaran dan keyakinan agama lain ;
2. Usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri secara bijaksana untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain ;
3. Usaha saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi masalah-masalah bersama ;
4. Usaha untuk saling bertukar pengalaman demi kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

— Mengembangkan dan memasyarakatkan kode etik penyiaran agama, berdasarkan pemikiran bahwa pendekatan secara manusiawi dalam menyiarkan agama mempunyai arti memberikan kemungkinan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk menentukan sikap

dan pilihannya tanpa ikatan dan tekanan apa-pun. Juga harus diingat bahwa tujuan agama adalah memberikan ketenteraman batin bagi pemeluknya, sehingga penganutan agama yang disebabkan oleh tekanan dan paksaan, betapapun kecilnya dan apapun bentuknya, hal ini pasti akan bertentangan dengan hati nurani dan merusak ketenteraman batin. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan diturunkannya agama itu sendiri dan dapat merendahkan martabat dan citra agama tersebut.

— Dalam melakukan dialog dengan penganut keyakinan yang lain hendaknya diarahkan untuk memperoleh saling pengertian dan menjawab tantangan masalah bersama untuk menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik.
Hendaknya setiap forum dialog yang dihadapi dapat dihindarkan dari terjadinya : debat, polemik, apologi dan kritik. Yaitu yang berarti :

a. Tidak saling mengemukakan kebenaran keyakinan masing-masing (debat) ;

b. Tidak saling menyerang melalui tulisan di mass-media atau pun bentuk penerbitan lainnya (polemik);

c. Tidak bersikap keras dalam mempertahankan kepercayaannya karena merasa terancam oleh pihak lain (apologi) ;

d. Tidak membantah keyakinan agama lain dengan menuntut pertanggung-jawaban.

— Kerukunan antar umat beragama yang hendak diciptakan adalah bukan membatasi kemajuan agama masing-masing, namun lebih bersifat suatu kerukunan yang dinamis dalam usaha masing-masing untuk maju dan berkembang.

Yang diperlukan adalah suatu situasi yang memungkinkan adanya dinamika sosial ke arah kemajuan bersama

tanpa harus ada pertentangan dan ketegangan sosial yang membahayakan kebersamaan itu sendiri.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI

P I M P I N A N

K e t u a,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomor : IX/MUBES—II/LEMKARI/81

T e n t a n g

SURAT PERNYATAAN DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI NOMOR 163/A—4/IV/1979 TANGGAL 20 JUNI 1979 MENGENAI AFILIASI LEMKARI KE DALAM GOLKAR MENJADI KEPUTUSAN MUBES KE II LEMKARI KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Besar Ke II LEMKARI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, dapat mengambil keputusan terhadap masalah yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi.
2. Bahwa dirasakan perlu untuk lebih meningkatkan partisipasi LEMKARI sebagai komponen Orde Baru dalam lingkungan dan wadah Keluarga Besar Golongan Karya.
3. Bahwa partisipasi LEMKARI dalam lingkungan Keluarga Besar Golongan Karya dalam kedudukannya sebagai lembaga dakwah, pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan,

adalah untuk melaksanakan pembaharuan serta pembangunan yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat baik dari segi lahiriah maupun batiniah.

4. Bahwa demi suksesnya partisipasi LEMKARI tersebut diperlukan penataan strategi dan taktik serta pembinaan kerjasama antara sesama komponen Orde Baru di dalam lingkungan Keluarga Besar Golongan Karya.
5. Bahwa untuk kelancaran segenap kegiatan LEMKARI di dalam menjalankan misinya untuk maksud tersebut di atas, Surat Pernyataan Direktorium Pusat No. 163/A-4/VI/1979 Tanggal 20 Juni 1979 perlu ditingkatkan menjadi Keputusan Mubes.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Golongan Karya Pasal 4 dan 10.
2. Strategi Dasar Program Umum Organisasi Golongan Karya;
3. Anggaran Dasar Lemkari Bab I pasal 3.
4. Surat Pernyataan Dirpus Lemkari No. 163/A-4/VI/1979 tanggal 20 Juni 1979.
5. Keputusan Dirpus Lemkari No. Kep-71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan No. Kep-103/C-4/VI/1981 Tanggal 3 Juni 1981 tentang Mubes II Lemkari.
6. Keputusan Mubes II Lemkari No. VII/MUBES II/LEMKARI/1981 tentang Program Umum.

Memperhatikan :

Putusan Rapat Paripurna VIII dalam MUBES II LEMKARI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI TENTANG PERNYATAAN DIRPUS LEMKARI NO. 163/A-4/VI/1979.

Pertama : Memutuskan Pernyataan Direktorium Pusat Lemkari Nomor 163/A-4/VI/1979 menjadi Keputusan Mubes II Lemkari.

Kedua : Pernyataan Direktorium Pusat Lemkari pada diktum pertama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

PIMPINAN

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

DIREKTORIUM PUSAT
LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI)
Jl. HOS. Cokroaminoto 195 — Telp. 367 KEDIRI

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 163/A-4/VI/1979

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat dan hidayah dari Alloh Subhanahu wa-Ta'ala bersama ini Direktorium Pusat LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) yang berpusat kedudukan di Kediri membuat/mengeluarkan PERNYATAAN sebagai berikut :

I. MENIMBANG:

1. Demi peningkatan pengabdian dan partisipasi LEMKARI sebagai komponen GOLKAR dalam lingkungan dan wadah Keluarga Besar Golongan Karya.
2. Bahwa pengabdian dan partisipasi LEMKARI tersebut dalam lingkungan Keluarga Besar GOLKAR sebagai lembaga da'wah/pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat lahiriyah dan rohaniyah.
3. Bahwa demi suksesnya pengabdian dan partisipasi LEMKARI tersebut diperlukan penataan/penertiban strategi/taktik dan pembinaan antar sesama komponen GOLKAR di dalam lingkungan Keluarga Besar Golongan Karya.

II. MENGINGAT:

1. Anggaran Dasar Golongan Karya pasal-pasal 4 dan 10.
2. Strategi Dasar Program Umum Organisasi Golongan Karya.
3. Muqodimah Anggaran Dasar LEMKARI.
4. Anggaran Dasar LEMKARI Bab II pasal-pasal 4, 5, 6 dan 7.
5. Program Umum LEMKARI.

III. M E M U T U S K A N :

1. LEMKARI (LEMBAGA KARYAWAN ISLAM) sebagai lembaga da'wah Islamiyah dan pendidikan kemasyarakatan yang berpusat kedudukan (Direktorium Pusat) di Kediri dengan seluruh Perwakilan-Perwakilan dan Senat-senat-nya di seluruh Indonesia menyatakan dengan tegas dan bulat untuk bergabung/berafiliasi kepada Keluarga Besar Golongan Karya sebagai komponen Golongan Karya.

2. LEMKARI sebagai komponen Golongan Karya mulai dari eselon pusat (Direktorium Pusat) sampai eselon terkecilnya di daerah-daerah (Study-Group) di seluruh Indonesia menyatakan bahwa taktis operasionil dari kegiatan kemasyarakatannya berada di bawah pembinaan Golongan Karya.

3. Pernyataan bahwa LEMKARI sebagai organisasi profesi berindukkan kepada Golongan Karya berlaku surut semenjak berdirinya LEMKARI sesuai dengan kenyataan yang ada.—

Dikeluarkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 20 Juni 1979.

DIREKTORIUM PUSAT
LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI)

Ketua — Ketua :

1. Drs. Bachroni Hartanto : .....
2. R. H. Eddy Masiadi : .....
3. S. Wirjoatmodjo, BA : .....
4. Drs. Andi Abubakar Sakti : .....
5. H. Soejadi Gitohardjo : .....

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

NOMOR : X/MUBES — II/LEMKARI/81

T e n t a n g

PENETAPAN SURAT PERNYATAAN DIREKTORIUM PUSAT LEMKARI NOMOR 165/A-4/VI/1979 TANGGAL 20 JUNI 1979 MENGENAI DISIPLIN KEANGGOTAAN LEMKARI MENJADI KEPUTUSAN MUBES KE II LEMKARI KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Besar Lemkari sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dapat mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi.

2. Bahwa untuk menciptakan keadaan masyarakat yang tertib, tenteram, dan dinamis sebagai kondisi yang diperlukan untuk pembangunan, maka perlu dijaga agar prinsip-prinsip yang tercantum dalam tri-logi kerukunan hidup umat beragama dapat senantiasa ditetapi dan dilaksanakan oleh setiap warga Lemkari, dan Warga Negara Indonesia pada umumnya.

3. Bahwa Keluarga Besar Golongan Karya sebagai pendukung Orde Baru merupakan wadah perjuangan yang harus dijaga dari kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan-tindakan pribadi.

4. Lemkari sebagai organisasi yang bernaung di dalam Keluarga Besar Golongan Karya merasa turut berkepentingan untuk memelihara citra Golongan Karya dan umat Islam pada umumnya, serta tegaknya disiplin organisasi dan nama baik Lemkari pada khususnya.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar LEMKARI BAB VIII
2. Surat Pernyataan Dirpus. Lemkari No. 165/A-4/VI/1979 tanggal 20 Juni 1979.
3. Surat Keputusan Dirpus. Lemkari No. Kep: 71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan No. Kep. 103/C-4/VI/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Mubes Lemkari.
4. Keputusan Mubes II Lemkari No. VIII/MUBES — II/LEMKARI/1981.

Memperhatikan :

1. Pidato pengarahan Bapak Menteri Agama R.I. H. Alamsyah Ratu Prawiranegara dalam pembukaan Mubes II Lemkari Tanggal 10 Juni 1981 di Jakarta.

2. Pidato pengarahan Bapak H. Amir Murtono, SH, Ketua Umum DPP Golkar dalam Mubes II Lemkari di Jakarta.

3. Keputusan Rapat Paripurna VIII dalam Mubes II Lemkari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Keputusan Mubes II Lemkari tentang pernyataan Dir.Pus. Lemkari No. 165/A-4/VI/1979.

Pertama : Menetapkan Surat Pernyataan Dir.Pus. Lemkari NO. 165/A-4/VI/1979 Tanggal 20 Juni 1979 menjadi Surat Keputusan Mubes II Lemkari.

Kedua : Keputusan Mubes II Lemkari dimaksud dalam diktum Pertama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan semestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM
(LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

P I M P I N A N

K e t u a ,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

(M. NOER ALI)

DIREKTORIUM PUSAT
LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI)
JL. HOS. Cokroaminoto 195 — Telp. 367 K E D I R I

S U R A T P E R N Y A T A A N

Nomor : 165/A-4/VI/1979

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat dan hidayah dari Alloh Subhanahu wa-Ta'ala bersama ini Direktorium Pusat LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) yang berpusat kedudukan di Kediri membuat/mengeluarkan PERNYATAAN sebagai berikut :

M E N I M B A N G :

1. Bahwa demi peningkatan pengabdian dan partisipasi LEMKARI sebagai komponen Golongan Karya dalam melaksanakan/mensukseskan program-program GOLKAR serta program-program Pemerintah perlu diadakan penertiban dan pengarahan keanggotaan LEMKARI.
2. Bahwa dalam rangka menggalang kerukunan hidup beragama yang merupakan landasan bagi pengembangan pembangunan diperlukan pembinaan dan pengarahan tabligh/da'wah bagi para muballigh dan muballighot LEMKARI.
3. Bahwa penertiban dan pengarahan keanggotaan LEMKARI sebagai dimaksud adalah sesuai dengan Statement Musyawarah Kerja III LEMKARI Tahun 1979 di Kediri.

M E N G I N G A T :

1. Anggaran Dasar LEMKARI.
2. Program Umum LEMKARI.
3. Keputusan-keputusan Musyawarah Kerja III LEMKARI Tahun 1979.

M E M U T U S K A N :

1. Setiap warga/siswa LEMKARI sebagai exponen GOLKAR diwajibkan memegang teguh disiplin organisasi Golongan Karya termasuk di dalamnya LEMKARI.
2. Setiap warga/siswa LEMKARI sebagai muballigh dan da'i diwajibkan memegang teguh kode etik da'wah untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan berpedoman kepada Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul dengan budi dan bahasa yang mengarah kepada Ukhuwah Islamiyah dan persatuan nasional.
3. Setiap warga/siswa LEMKARI dilarang keras mengajarkan/mentablighkan ajaran Darul-Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa Agung RI dengan Surat Keputusannya No. 089/DA/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971.
4. Demi penertiban dan pengembangan organisasi LEMKARI dalam lingkungan Keluarga Besar Golongan Karya maka bagi setiap warga/siswa LEMKARI yang telah terbukti dan nyata mengajarkan/mentablighkan ajaran Darul-Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa Agung RI akan dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan LEMKARI.
5. Bagi setiap warga/siswa LEMKARI yang telah melanggar ketentuan pelarangan mengajarkan/mentablighkan ajaran Darul-Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa Agung RI adalah tidak menjadi tanggung jawab LEMKARI dan merupakan tindakan oknum di luar ketentuan dan pertanggungjawaban LEMKARI.

Dikeluarkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 20 Juni 1979.

DIREKTORIUM PUSAT
LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI)

Ketua — Ketua :

1. Drs. Bachroni Hartanto : .....
2. R. H. Eddy Masiadi : .....
3. S. Wirjoatmodjo, BA : .....
4. Drs. A. Abubakar Sakti : .....
5. H. Soejadi Gitohardjo : .....

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomor : XI/MUBES II/LEMKARI/1981

T e n t a n g

PENDAYAGUNAAN POTENSI LEMKARI UNTUK KEMENANGAN GOLONGAN KARYA PADA PEMILU 1982

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Besar Ke II Lemkari sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang untuk menentukan taktik dan strategi organisasi.
2. Bahwa dalam menghadapi Pemilu 1982 perlu segera berbenah diri untuk memenangkan Golkar pada Pemilu 1982.
3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu membuat penggarisan-penggarisan yang tegas dan jelas tentang pendayagunaan potensi Lemkari untuk kemenangan GOLKAR pada Pemilu 1982.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Lemkari.

2. Program Umum Lemkari.
3. Keputusan Dirpus. Lemkari No. Kep 71/4/V/1981 dan No. Kep. C-4/VI/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang MUBES II LEMKARI.

Memperhatikan :

1. Pidato sambutan Bapak Menteri Agama RI pada pembukaan MUBES II Lemkari tanggal 10 Juni 1981.
2. Pidato pengarahan Bapak Ali Murtopo Pembina DPP GOLKAR pada tanggal 11 Juni 1981.
3. Pidato pengarahan Bapak H. Sapardjo Sekjen Dewan Pembina DPP GOLKAR pada tanggal 11 Juni 1981.
4. Pidato pengarahan Bapak H. Amir Murtono, SH Ketua Umum DPP GOLKAR pada tanggal 11 Juni 1981.
5. Pidato pengarahan Bapak H. Mukhlis Sugiyanto Sekjen DPP GOLKAR pada tanggal 11 Juni 1981.
6. Pidato pengarahan Bapak K.H. Thohir Widjaya Ketua Umum DPP MDI Keluarga Besar Golongan Karya pada tanggal 12 Juni 1981.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Keputusan hasil MUBES II LEMKARI Keluarga Besar Golongan Karya tentang "Pendaya Gunaan Potensi LEMKARI untuk kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1982".

Pertama : Mengikut sertakan muballigh-muballigh LEMKARI dalam penataran Kader-kader dan Muballigh Pembangunan Golongan Karya di Pusat dan Daerah.

K e d u a : Mendayagunakan seluruh warga LEMKARI untuk menarik simpati masyarakat dalam usaha memenangkan Orde Baru dalam Pemilu 1982.

K e t i g a : Mengefektifkan kegiatan-kegiatan dakwah Muballigh-muballigh LEMKARI untuk sekaligus menjadi juru kampanye Golkar dalam masa pra kampanye Pemilu 1982.

K e e m p a t : Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan segenap warga LEMKARI dalam lingkungannya masing masing untuk membina dan memantapkan massa pemilih di dalam memberikan dukungan sepenuhnya memenangkan GOLKAR dalam Pemilu 1982.

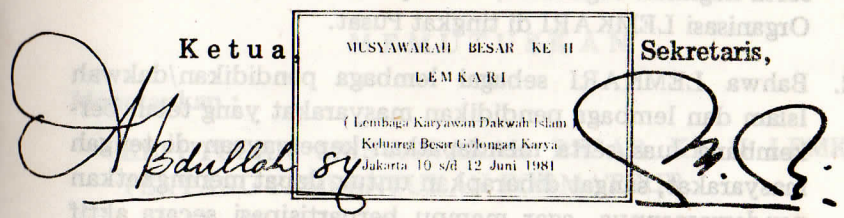
K e l i m a : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan dikemudian hari akan dibenarkan semestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

P I M P I N A N

K e t u a , Sekretaris,



(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

Nomor : XII/MUBES — II/LEMKARI/1981

T e n t a n g

PEMBENTUKAN FORMATEUR
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan untuk melaksanakan Program Umum dan segala usaha serta kegiatan organisasi, maka perlu ditetapkan Pimpinan Organisasi LEMKARI di tingkat Pusat.
2. Bahwa LEMKARI sebagai lembaga pendidikan/dakwah Islam dan lembaga pendidikan masyarakat yang telah berkembang luas serta mendapatkan kepercayaan di tengah masyarakat, sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan pendewasaannya, agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam menunjang program-program Golongan Karya/ Program-program Pemerintah Orde Baru untuk membangun manusia seuutuhnya.
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari yang memimpin jalannya organisasi perlu didukung oleh personalia yang benar-benar berjiwa pengabdian penuh terhadap organisasi, berwibawa, terpercaya dan

dian penuh terhadap organisasi, berwibawa, terpercaya dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik.

4. Bahwa sesuai dengan peraturan Tata Tertib Mubes ke II LEMKARI perlu ditetapkan formateur untuk memilih dan menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar LEMKARI BAB III Pasal 15 dan 16 tentang Struktur Organisasi.
2. Keputusan Dirpus Lemkari No. Kep. 71/C-4/V/1981 tanggal 7 Mei 1981 dan No. Kep. 103/C-4/VI/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang MUBES II LEMKARI.
3. Keputusan MUBES II LEMKARI No. II/MUBES-II/LEMKARI/1981 tentang Peraturan Tata Tertib Mubes II Lemkari.

Memperhatikan :

Laporan pertanggung jawaban Direktorium Pusat Lemkari dalam Rapat Paripurna Mubes II Lemkari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI TENTANG PEMBENTUKAN FORMATEUR.

Pertama : Membentuk Formateur untuk menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari, terdiri dari 3 (tiga) orang masing-masing :

1. Sanusi Kurnaen Rasyidi, SH.
2. H. Soejadi Gitohardjo.
3. Drs. H. A. Suarno.

Kedua : Memberikan tugas dan wewenang penuh kepada Formateur tersebut pada diktum pertama Keputusan ini untuk atas nama Mubes II Lemkari, memilih, menyusun dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari Periode 1981 — 1985.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini Formateur selalu berpedoman kepada Anggaran Dasar Lemkari dan memperhatikan persyaratan-persyaratan :

a. Bertaqwa kepada Alloh SWT.

b. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

c. Mempunyai jiwa pengabdian kepada perjuangan organisasi Lemkari.

d. Mempunyai kemampuan mengembangkan organisasi.

e. Mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

f. Memberikan citra pembaharuan dan pembangunan.

Keempat : Komposisi dan Personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari yang berhasil disusun Formateur dituangkan dalam bentuk Keputusan yang mempunyai kekuatan sebagai keputusan MUBES II LEMKARI.

Kelima : Tugas Formateur tersebut berakhir setelah tersusunnya Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari Periode 1981 — 1985.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki semestinya.—

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

P I M P I N A N

Ketua,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

Sekretaris,

(Ir. ABDULLAH SYAM) **(M. NOER ALI)**

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

NOMOR : XIII/MUBES II/LEMKARI/1981

Tentang

SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN KURATOR DAN DIREKTORIUM PUSAT
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

MENIMBANG :

1. Bahwa Musyawarah Besar Ke II Lemkari adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Bahwa perlu dijaga adanya kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam program-program umum Lemkari.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar Lembaga Karyawan Dakwah Islam BAB VII, VIII dan IX mengenai kepengurusan, senat, musyawarah dan rapat.
2. Keputusan No. XII/MUBES II/LEMKARI/1981.
   Tentang penunjukan formatur untuk menyusun personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari Karyawan Dakwah Islam.

MEMPERHATIKAN :

Permusyawaratan dalam Musyawarah Besar Ke II Lemkari yang membahas tentang Susunan Personalia Dewan Kurator dan Direktorium Pusat Lemkari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Susunan Kepengurusan Lemkari Periode 1981/1986 yang disusun oleh Formatur.
   Terdiri dari nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
2. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diadakan pembetulan semestinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 1981
Jam : 23.45 WIB.

MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI
PIMPINAN

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI

Ketua,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

Sekretaris,

(M. NOER ALI)

LAMPIRAN KEPUTUSAN.

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
NOMOR : XIII/MUBES II/LEMKARI/1981

Tentang

SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN KURATOR DAN DIREKTORIUM PUSAT

DEWAN KURATOR :

1. H. Namiiruddin, SH.
2. Drs. Bachroni Hartanto.
3. Drs. H. Ahadi Mangunkarta.
4. R.S. Kurnaen Rasyidi, SH.
5. H. Soetojo Wirjoatmodjo, BA.

DIREKTORIUM PUSAT :

Ketua Umum	:	R.H. Eddy Masiadi
Ketua I	:	H. Soejadi Gitohardjo
Ketua II	:	Drs. H. Akhmad Suarno
Ketua III	:	Ir. Abdullah Syam
Ketua IV	:	M. Noer Ali
Sekretaris Umum	:	Drs. H. Syamsudin
Sekretaris I	:	Ir. Soenaryo
Sekretaris II	:	Abusaifan Ahmad, BA
Sekretaris III	:	H. A.H. Abdul Malik, BA
Sekretaris IV	:	Agus Irtadji
Bendahara Umum	:	H. Dawud Sri Nurhidayat
Bendahara I	:	Sahlan Imam
Bendahara II	:	H. Abd. Somad.

BIDANG — BIDANG :

I. Bidang Pendidikan Agama dan Dakwah.

1.1. H. Zainul Muttaqin
1.2. Kasmudi Assiddiki
1.3. Drs. Juarsa.
1.4. Mudzakkir Ridwan.

2. Bidang Pendidikan Umum dan Kemasyarakatan.

1. Ir. H. Ermanto
2. Drs. H. Tanu Sastramihardja
3. Hartono Slamet
4. R. Sunaryo

3. Bidang Organisasi dan Pengembangan.

1. Dr. Ir. Ubuh Bukhara
2. B. Soenaryo, BA
3. Andi Abdul Azis, BA

4. Bidang Humas dan Penerangan.

1. H. Hartono Riyad
2. Ir. Edi Marwoto
3. Ir. Dodi Rochdiat.

5. Bidang Kesejahteraan dan Perlengkapan.

1. Ir. Nasija Warnadi
2. dr. Subarno Kartawinata
3. H. Rustiono.

6. Bidang Pembinaan Generasi Muda.

1. drh. Endi Ridwan
2. Deddy Yusuf Muhajir, BIE
3. drg. Bambang Hadibowo.

7. **Bidang Peranan Wanita.**

1. Dra. Sri Tutini. K.
2. dr. Rusmini Suyardi
3. Nona Sujatma, SH.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI

P I M P I N A N

K e t u a ,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

Sekretaris,

(M. NOER ALI)

MUSYAWARAH BESAR KE II
L E M K A R I

PERNYATAAN LEMKARI SEBAGAI HASIL MUBES II DI JAKARTA TANGGAL 10 — 12 JUNI 1981

BAHWASANYA :

— Perjuangan Orde Baru adalah untuk mengisi kemerdekaan Indonesia melalui berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

— Keutuhan negara dan kesatuan nasional bangsa Indonesia merupakan kondisi mutlak yang harus dijaga kelestariannya sebagai wujud dari kesepakatan seluruh warga negara Indonesia untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kehidupan bernegara.

— Partisipasi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat merupakan kondisi pokok untuk keberhasilan pembangunan, juga adanya kerjasama, gotong-royong dan kerukunan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai faktor penggalang seluruh potensi bangsa Indonesia.

— LEMKARI sebagai lembaga dakwah dan pendidikan masyarakat adalah merupakan komponen Golongan Karya yang tetap berada dalam satu barisan dengan seluruh jajaran Orde Baru untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan tujuan perjuangan Orde Baru.

OLEH KARENA ITU :

— LEMKARI secara konsekwen bertekad untuk melanjutkan dan mengisi cita-cita perjuangan Orde Baru, serta turut menjaga

kesinambungan pembangunan hingga tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat.

— LEMKARI akan menempatkan dirinya secara lebih aktif sebagai lembaga dakwah dan pendidikan masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman masyarakat, yaitu dengan secara konsekwen menetapi prinsip trilogi kerukunan umat beragama sebagai konsensus sosial yang telah ditetapkan.

— LEMKARI merasa terpanggil untuk meningkatkan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat serta kelompok sosial yang ada untuk bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan persatuan nasional, tetap mawas diri, bertenggang rasa, saling menghormati dan meningkatkan kerja sama dalam semangat "bersepakat dalam perbedaan".

DENGAN DEMIKIAN :

— LEMKARI siap untuk mendukung dan memenangkan Golkar dalam Pemilu 1982.

— LEMKARI siap untuk meningkatkan kemampuan kerja Organisasinya agar dapat didaya-gunakan sebagai potensi pembangunan, secara bahu membahu dengan unsur-unsur pendukung Orde Baru lainnya dalam rangka menjawab tantangan masalah bangsa Indonesia.

— LEMKARI sebagai lembaga dakwah akan terus meningkatkan kwalitas anggotanya untuk dapat tetap menjaga kesucian agama Islam berdasarkan sumber aslinya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, shallallahu alaihi wassallam.

— LEMKARI sebagai lembaga pendidikan masyarakat akan terus meningkatkan keluhuran akhlak para anggotanya agar dapat menjadi warga negara yang baik, berbudi luhur dan mampu menunjukkan perilaku dan sikap sosial yang sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

— LEMKARI akan meningkatkan kewaspadaan setiap anggotanya untuk tidak terpancing oleh usaha-usaha golongan ekstrim yang akan menyelewengkan dan mengubah landasan negara, dengan melalui usaha-usaha yang berkedok kegiatan agama dan mempergunakan bendera Islam.

— LEMKARI akan tetap konsisten dengan sikap dan tujuan perjuangannya sebagai penyebar dan penegak syi'ar Islam, serta sebagai pengiring dan pengisi proses perubahan masyarakat dalam dinamika pembangunan bangsa Indonesia.

SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA SENANTIASA MEMBERI KEKUATAN DAN RAHMATNYA BAGI KITA SEMUA, AMIN !

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
KELUARGA BESAR GOLONGAN KARYA

P I M P I N A N

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH BESAR KE II
LEMKARI
(Lembaga Karyawan Dakwah Islam)
Keluarga Besar Golongan Karya
Jakarta 10 s/d 12 Juni 1981

(Ir. ABDULLAH SYAM) (M. NOER ALI)

****

RALAT

NOMOR	HALAMAN	BARIS DARI	TERTULIS	BETULNYA
1.	7	atas no. 4	umar beragama	umat beragama.
2.	13	atas no. 9	meningkat	meningkatkan
3.	13	atas no. 10	ihtiar	Ikhitiar
4.	18	bawah no. 7	terselenggaranya	diselenggarakan
5.	26	bawah no. 5 dan no. 6	bilangan & hendak	bilamana & berhak
6.	36	No. 1 bawah	Pelaksanaan	Pelaksana
7.	71	bawah no. 2	melaksanakan	dilaksanakan
8.	87	atas no. 3	mengikat	diikat
9.	89	bawah no. 11	wahyu Illahi	wahyu Ilahi
10.	90	atas no. 3	Rasululoh S.A.W.	Rasululloh S.A.W./Rosul Alloh S. A.W.
11.	60	atas no. 1	Pada persetujuan	atas Persetujuan
12.	90	atas no. 1	bernya yaitu	mustinya tidak ada / hilang.
13.	117, 63, 60.	kolom Pertama bawah	tidak ada stempel Mubes kurang	ada stempel Mubes pada antara tanda tangan Ketua & Sekretaris.

I. Halaman 11 baris ke 4 dari bawah, lanjutan dari kata-kata Warga/anggotanya.

untuk membahas tentang hal ihwal
yang bersangkutan dengan kehidupan
umat Islam di Indonesia.

II. Pada halaman 49 ada kata-kata Bismilahirrohmanirrohim kolom ke 2 dari bawah.

III. Pada halaman 45 baris ke 17 ada kata-kata Bismilahirrohmanirrohim dan kata-kata

Musyawarah Besar Ke II
Lembaga Karyawan Dakwah Islam (Lemkari)
Keluarga Besar Golongan Karya

IV. Pada halaman 15 baris ke 17 ada kata-kata Bismilahirrohmanirrohim dan kata-kata

Musyawarah Besar Ke II
Lembaga Karyawan Dakwah Islam (Lemkari)
Keluarga Besar Golongan Karya